PEMIKIRAN POLITIK DELIAR NOER DALAM KONTEKS POLITIK ISLAM DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah

Oleh:

IRA RAHMADANI
NIM. 1315035

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1441 H/2019 M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Ira Rahmadani/ 1315035
Tempat/ tanggal lahir	: Sungai Pimping, 24 Maret 1997
Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Judul Skripsi	: Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis selain yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Oktober 2019

Yang menyatakan



Ira Rahmadani

Nim. 1315035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia "** yang disusun oleh **Ira Rahmadani Nim : 1315. 035**, telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Oktober 2019

Pembimbing I

Dr. Busyro, M. Ag
NIP. 197409061999031002

Pembimbing II

Adlan Sanur TH, M. Ag
NIP. 197603222005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia"** yang disusun oleh **Ira Rahmadani Nim : 1315. 035**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 14 November 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 14 November 2019

Ketua

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum
NIP. 197405251998031006

Sekretaris

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Anggota,

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum
NIP. 197405251998031006

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Dr. Busyro, M. Ag
NIP. 197409061999031002

Adlan Sanur TH, M. Ag
NIP. 197603222005011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP.196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Ira Rahmadani/ 1315.035
Tempat/ tanggal lahir	: Sei Pimping, 24 Maret 1997
Program Studi	:Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	:Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis selain yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skrips ini bukan karya sendiri, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Oktober 2019

Yang menyatakan

Ira Rahmadani

1315.035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul**: "Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia "** yang disusun oleh **Ira Rahmadani Nim : 1315. 035**, telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Oktober 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M. Ag	**Adlan Sanur TH, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197603222005011003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia"** yang disusun oleh **Ira Rahmadani Nim : 1315. 035**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 14 November 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 14 November 2019

Ketua	Sekretaris
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197606062006041004**

Anggota,

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197606062006041004**
Dr. Busyro, M. Ag	**Adlan Sanur TH, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197603222005011003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP.196804091994031008

ABSTRAK

Skiripsi ini berjudul **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia"** yang disusun oleh **Ira Rahmadani, NIM 1315.035.** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul skiripsi ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pandangan politik Deliar Noer dalam politik Islam Indonesia.

Motivasi penulis dalam membahas masalah ini adalah melihat hubungan Islam dan gerakan politik di Indonesia yang tidak pernah berujung. Deliar Noer (1926-2008) merupakan sosok Intelektual Islam yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan Islam dan gerakan kenegaraan. Deliar yang berlatar belakang pendidikan Barat, namun dalam pemikirannya ia dikenal dengan sosok yang Islamis, pernah menjabat sebagai ketua umum HMI (1952-1953), pada era orde baru pernah terlibat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) dan di era reformasi mendirikan partai berbasis Islam yaitu Partai Umat Islam (PUI) sekaligus menjabat sebagai ketua partai tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik ingin mengkaji tentang pemikiran politik Deliar Noer dalam konteks politik Islam di Indonesia.

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)* yaitu serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dalam menganalisis data penulis menggunakan *content analisis* yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, karya tulis kemudian akan diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru. Dengan cara mencari buku-buku yang berkenaan dengan Deliar Noer dan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang penulis angkatkan dan kemudian dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.

Setelah penulis membahas dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa kiprah Deliar Noer di dunia politik Indonesia tidak sebaik nama besarnya di dunia ilmu pengetahuan karena kurang memiliki kepiawaian dalam memainkan dan mengendalikan emosi massa. Pemikiran politik Deliar Noer dalam politik Islam bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat serta negara dengan mencontoh kepada hal-hal yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan konsep negara Islam bisa mengacu kepada suatu sistem tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga relevan dengan kondisi dan situasi suatu negara. Kemudian dalam politik Indonesia Deliar Noer menyarankan agar partai-partai Islam bekerjasama untuk menegakkan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama. Idealnya, negara akan berjalan pada rel Islam meskipun negara dalam bentuk Republik serta berjalan pada sistem demokrasi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Shalawat dan salam penulis doakan pada Allah SWT agar tetap tercurahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing kita para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia".**

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Sahut Simarmata dan Asro Siregar) yang telah memberikan cinta serta kasih sayang dan bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menuntut ilmu dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya kepada saudara/i penulis serta seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu penulis sendiri.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari pihak lain. Oleh sebab itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini di antaranya:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi beserta bapak wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Ismail, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta wakil Dekan I, wakil Dekan II dan wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. Helfi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukitinggi.
4. Bapak Dr. Busyro, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Adlan Sanur Th, M. Ag selaku Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
5. Bapak H. Andriyaldi, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan penulis berupa literatur dalam proses penyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah angkatan 2015, teman-teman satu lokal Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), senior serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tatanegara (Siyasah), dan teman-teman satu kos.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Bukittinggi, 29 Oktober 2019
Penulis

Ira Rahmadani
1315.035

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Penjelasan Judul 12

F. Tinjauan Pustaka 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II POLITIK ISLAM DI INDONESIA **18**

A. Pengertian Politik Islam/ Siyasah 18

B. Konsep Politik Islam di Indonesia 21

C. Sejarah Gerakan Politik Islam di Indonesia 24

a. Politik Islam menjelang kemerdekaan 24

b. Politik Islam era demokrasi liberal 27

c. Politik Islam era demokrasi terpimpin 29

d. Politik Islam era orde baru 31

e. Politik Islam era Reformasi..... 33

D. Tokoh-tokoh Politik Islam Indonesia…….. 38

E. Gerakan Politik Islam di Indonesia……. 43

BAB III BIOGRAFI DELIAR NOER……. 52

A. Masa Kecil Deliar Noer 52

B. Pendidikan Deliar Noer..... 54

C. Karir dan Karya Deliar Noer..... 61

BAB IV HASIL PENELITIAN 67

A. Deliar Noer dalam kancah politik Islam Indonesia..... 67

B. Politik Islam di Indonesia dalam pemikiran Deliar Noer..... 71

C. Kontribusi pemikiran politik Deliar Noer ……... 79

D. Analisa Penulis……. 81

BAB V PENUTUP..... 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran..... 85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dunia Islam pada abad 20 tidak terlepas dari rangkaian peristiwa dari abad-abad sebelumnya. Dunia Islam menampakkan pergolakan dengan corak-corak pemikiran, baik yang mengacu ke pemikiran awal (Islam klasik) yang menginginkan akomodasi antara Islam dan pemikiran Barat (modern) dan bercorak sekuler, khususnya dalam masalah politik (negara) dan agama.

Di dunia Islam muncul tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan: *Pertama,* aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencangkup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. Menurut aliran ini dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan yang diterapkan di dunia Barat. *Kedua,* aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW hanya seorang utusan Allah SWT bukanlah sebagai kepala negara ataupun mendirikan negara, disebut dengan sekularisme yaitu faham politik yang berusaha untuk memisahkan persoalan keagamaan dengan persoalan politik kenegaraan. *Ketiga,* aliran ketiga ini menolak Islam sebagai agama yang serba lengkap.[1] Dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, namun berbeda dengan aliran kedua, aliran ini menolak Islam sebagai agama dalam pengertian Barat. Aliran ini berpendirian

[1]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 1.

bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat sistem politik tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu sistem politik. Aliran ini berusaha untuk merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman, Islam memberikan seperangkat nilai-nilai yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umatnya. [2]

Islam sebagai sebuah kekuatan politik memberi kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Dinamika Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 menunjukkan sebagai gerakan politik. Kebangkitan nasional dalam rangka memusnahkan imperialisme dan penjajahan yang sudah berabad-abad menginjak bumi nusantara menggugah pemimpin Islam membentuk suatu gerakan yang berkesadaran sebagai suatu bangsa. Pola gerakan Islam di Indonesia terlihat mulai berubah, dari pola komunal menjadi pola asosiasional dan solidaritas yang bersifat organis.[3]

Gerakan Islam modern pada awal abad ke-20 lahir dari gerakan reformisme pemikiran Islam dan dari Islam tradisional yang tetap memegang tradisi sebagai reaksi terhadap pembaruan Islam. Munculnya gerakan nasionalisme Islam merupakan respon terhadap kebijakan pemerintahan hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan penjajah kolonial yang melakukan *the secularitation of polity* yang antara lain berbentuk birokratisasi kolonial.

[2]Ejournal.politik.lipi.go.id>jppPDF hasil web Pemikiran politik Islam dalam persfektif…-jurnal penelitian politik. Di akses pada 28 Oktober 2019 Pukul 16.25 WIB.

[3]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 191.

Kebijakan pemerintah hindia Belanda terhadap Islam dengan mendeskreditkan secara birokratis serta adanya misionarisasi agama tertentu. [4]

Kebangkitan nasionalis awal abad ke-20 dalam pergerakan kebangsaan Indonesia direpresentasikan ke dalam corak gerakannya dan organisasi-organisasi yang berbentuk nasionalisme Islam, sekuler, dan sosialisme-komunis. Dari golongan Islam lahir organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909) dan Solo (1911), Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (Persis) di Bandung (1920-an), Nahdhatul Ulama di Surabaya (1926), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Candung, Bukittinggi (1930). Adapun dalam bentuk partai-partai politik, seperti SI (Sarekat Islam) (1912) sebagai kelanjutan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) (1932) sebagai kelanjutan dari organisasi Pendidikan Thawalib dan Partai Islam Indonesia (PII) tahun 1938.[5]

Mengenai hubungan antara Islam dan politik dalam diskursus intelektual dan historitas pemikiran serta praktek politik Islam di Indonesia, memang terdapat banyak pendapat yang berbeda. Ada sementara kalangan yang menilai bahwa di Indonesia ada beberapa *mainstream* (arus utama) pemikiran politik Islam. Arus pertama dapat disebut *formalistik/skriptualistik.* Pemetaan ini mengacu pada bentuk pemikiran yang dikembangkan dengan mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam formal. Orientasi politik formalistik di satu pihak menunjukkan bahwa kulturalisasi Islam ditransformasikan ke dalam politisasi, yang kemudian memunculkan simbolisme Islam. Pemunculan secara formalis atas

[4]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*,…, hal. 193.
[5]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*,…, hal. 194.

otentisitas bahwa wahyu menunjukkan ikatan yang kuat pada skriptualisme-tradisionalis, di samping mempertahankan kecendrungan fundamentalis untuk menekankan konsep skriptural Islam. Formalisme Islam menggabungkan penafsiran literal atas kitab suci, yang menekankan skriptualisme tradisional. Beberapa unsur dari formalisme Islam moderat terlihat misalnya dalam ide-ide intelektual universalis. Untuk membuat Islam bagai kekuatan pembebas, kaum universalis melihat perlunya Islam dilembagakan.

Di samping itu, ada pula arus yang cenderung menekankan pentingnya tingkat makna substansial tertentu sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Karena itu, arus ini dapat disebut substantivistik. Pemetaan ini menunjukkan orientasi politik yang dikembangkan lebih menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya.[6]

Dalam konteks inilah umat Islam di Indonesia berupaya membawa Islam ke dalam kehidupan politik. Memang secara statistik tidak dapat dibantah bahwa umat Islam merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia. Namun, dalam kenyataan historis pendukung "Islam politik" tidak demikian adanya. Kuntowijoyo berpendapat bahwa masyarakat Islam sekarang secara kualitatif bukan mayoritas. Mereka merupakan proletar di lapisan bawah, sehingga peran Islam politik di Indonesia belum berfungsi secara maksimal.[7]

Islam di Indonesia telah berkembang di dalam berbagai macam lapisan masyarakat; mulai dari tingkat pedesaan sampai ke tingkat perkotaan, di

[6]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*,…,,hal. 233-235.

[7]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), hal. 35

masyarakat bawah maupun dalam istana; dan tingkat awam sampai pada tataran terpelajar. Oleh karena itu, sejarah keterlibatan orang Islam dalam politik di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan golongan. Namun, dari perspektif politik masing-masing lapisan tersebut memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi ini, termasuk pendidikan, strata sosial ekonomi dan lainnya. Akibatnya, menjadi sangat sulit untuk menyatukan visi mereka dalam suatu perkumpulan gerakan Islam politik secara terkonsentrasi dan terpadu. Politik revolusioner yang diperankan oleh Syarikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU) serta ditambah lagi sikap sekelompok masyarakat Islam yang cenderung radikal akibat selalu tersisih, telah mewarnai fenomena Islam politik Indonesia.[8]

Negara menurut Deliar Noer adalah semacam bentuk ikatan antar manusia, semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat mempergunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan ini pada umumnya ada dua macam, *pertama*, yang meliputi keseluruhan segi hidup manusia, *kedua* meliputi hanya sebagian dari segi-segi hidup manusia itu. Dalam negara kekuasaan itu bersifat mutlak dan bulat pada penguasa, maka mungkin sekali terjadi segala segi hidup rakyat termasuk rohaniahnya dikuasainya. Sedangkan dalam negara yang tidak membulatkan kekuasaan pada tangan penguasa, melainkan kebebasana berada di tangan rakyat, maka hanya beberapa segi kehidupan sosial dari rakyat tersebut yang dikuasai oleh negara. Dalam suatu negara ada yang mencoba untuk menguasai keseluruhan segi hidup manusia, tetapi terdapat pula lobang-lobang

[8]M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku bangsa: risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal. 196.

yang meloloskan segi-segi hidup tertentu dari penguasaan atau pengawasan. Oleh sebab itu, bentuk ikatan antar manusia yang disebutkan negara itu tidak bersifat menyeluruh dan ebebasan pada warga negara tidak bersifat mutlak, ada batas-batas tertentu yang harus dijaga, diingat, yang tidak boleh dilampaui.[9]

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara Islam. Indonesia sendiri belumlah berhasil memecahkan masalah seperti ini. Lebih lanjut Deliar mengungkapkan bahwa semenjak Indonesia merdeka, Islam terus berkembang dengan memperoleh jumlah pengikut yang banyak di kalangan suku-suku bangsa yang masih animistis, para pendukung ide masuknya Islam dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia berpendapat bahwa ciri dasar dari agama Islam tidak memungkinkan negara menjadi bersifat teokrasi karena Islam tidak mengakui sistem kependetaan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi negara Indonesia dalam periode Orde Lama, Orde Baru, serta Reformasi membuat Deliar Noer ikut berperan dalam memikirkan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia ke depannya. Hal ini, membuat Deliar Noer mempunyai kedekatan dengan beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia, yaitu M. Hatta dan M. Natsir pada era orde lama. Kedekatan hubungan Deliar Noer dengan M. Hatta telah mempengaruhi pemikiran M. Hatta terhadap Deliar Noer, sehingga Deliar Noer mengetahui sosok M. Hatta yang dituangkan dalam sebuah buku "Muhammad Hatta: Biografi Politik". Sosok M.

[9]Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik (Edisi Baru),* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1982), hal. 62-63.

Hatta yang religius membuat Deliar Noer tertarik dengan gaya kepemimpinan M. Hatta dengan sikap, moral, serta integritas yang tinggi. [10]

Deliar Noer merupakan seorang ilmuan yang cerdas, kapasitas keilmuannya diakui di tingkat nasional dan Internasional. Di dalam negeri Deliar Noer dikenal mempunyai kedekatan dengan M. Hatta, M. Natsir, Sjahrir, Soekarno bahkan juga Soeharto dan ratusan tokoh bangsa lainnya. Mengenai kehidupannya di luar negeri selain kapasitas keilmuannya Deliar Noer juga dikenal sebagai ilmuwan yang hidup dalam kenyataan "kekinian dan kedisinian" sambil cita-citanya tertera jauh ke depan. Deliar Noer tidak hanya membahas fenomena dengan teori dan analisa, tetapi Deliar Noer mau turun tangan ikut bekerja, berbenah, menceburkan diri dalam lumpur perjuangan perbaikan nasib bangsa yang telah tercabik-cabik.[11]

Dalam pemikiran Deliar Noer, Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap sehingga antara Islam dan keindonesiaan harus terjalin sintesis, bentuk negara Islam masih bersifat fleksibel asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta relevan dengan kondisi suatu bangsa. Menurut Deliar Noer, gerakan-gerakan masyarakat pribumi yang menentang kolonialisme Belanda sebagian besar disponsori kalangan Islam terutama Sarekat Islam (SI). Sehingga para pengkaji sejarah pergerakan di Indonesia tentu saja mencatat bahwa Islam memainkan peranan yang sangat menentukan dalam upaya memerdekakan Indonesia, Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam

[10]https://radarsukabumi.com/2019/05/13/politik-islam-pasca-pemilu/ Di akses pada 28 Oktober 2019 pukul 16.45 WIB.

[11]Ismanizar, Kepemimpinan Negara Menurut Pandangan Deliar Noer. (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017). Hal. 236.

menentang kolonial pada saat itu. Islam dan nasionalisme dalam tataran itu menjadi satu keping mata uang yang berguna untuk membangun semangat perjuangan anti kolonialisme. Bahkan Sarekat Islam (S1) sebagai organisasi politik nasional yang pertama, sangat bersemangat menyerukan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi pada proses perkembangan selanjutnya, tidak semua golongan Islam menerima terhadap ideologi Islam yang ditawarkan Sarekat Islam (SI).[12]

Pada tahun 1953 dalam kongres se-Indonesia di Jakarta, Deliar Noer terpilih sebagai ketua Umum Pengurus Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Mengenai perjalanannya dalam menghadapi HMI, pada masa itu selalu mengalami konflik dengan Masyumi. Konflik antara HMI dan Masyumi terus merambah hingga periode kepemimpinan Deliar Noer. Pengalaman hidup Deliar Noer dalam segi kepemimpinannya menampilkan corak politik yang disikapi dan dihayati sebagai moral yang membimbing kekuasaan ke arah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Hakikatnya dapat terus dipertahankan dalam perluasan eksistensi politik keIndonesiaan, dan Islam adalah nama yang menjadi sifat yang tertanam dalam sepakterjangnya menghadapi kenyataan-kenyataan politik di Indonesia.[13]

Deliar Noer dalam segi hal pemimpin merupakan sebagai sosok intelektual serta mencoba memberanikan diri tampil dan ikut serta membawa perkembangan politik Indonesia ke arah yang lebih beradab. Pengetahuan dan

[12]Ismanizar Al-Lubb, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 226-244, 2017, Diakses pada 11 Desember 2018, Jam 21.27 WIB.

[13]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar* Noer, …, hal. 335.

ilmu yang diperolehnya tidak membuatnya menjadi bersikap netral terhadap perkembangan sosial politik yang terjadi di tanah air. Deliar Noer menerjunkan diri dalam ruang dan aktivitas politik nasional di mana banyak kalangan seperti tidak turut serta dengan menyebutkan dunia politik praktis sebagai sesuatu yang kotor. Namun, ia memahami politik sebagai bagian dari perjuangan hidup mencapai keridhoan Ilahi. Deliar Noer memandang politik secara lebih serius, mendalam dan sebagai esensi dalam membawa perkembangan masyarakat kepada kemaslahatan dan nilai-nilai yang lebih luhur.[14]

Pada saat kekuasaan Orde Baru runtuh dengan segera muncul belasan partai politik berideologi Islam. Lahirnya partai politik tersebut tentu saja menjadi indikasi untuk mengembangkan kembali paradigma integralistik antara agama dan politik yang utuh *(Islam din wa dawlah).* Deliar Noer termasuk di dalamnya yang mendirikian Partai Umat Islam (PUI) berideologi Islam. Sikap dan gerakan politik Deliar Noer sebenarnya telah ditunjukkan pada awal Orde Baru berkuasa. Ia bersama Muhammad Hatta dan sejumlah mantan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), meskipun pada saat itu Presiden Soeharto menolak berdirinya partai tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya aktifitas politik Deliar yang menonjol adalah hubungannya dengan kelompok Petisi 50 dan keterlibatannya dalam Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FPKR) yang saat itu dinilai oleh sebagian kalangan sebagai salah satu komunitas paling kritis terhadap Orde Baru. Aktifitas

[14]Ismanizar Al-Lubb, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 226-244, 2017, Diakses pada 11 Desember 2018, Jam 21.27 WIB.

ini memperlihatkan konsistensi sikap politik Deliar sekaligus keberaniannya untuk beramar ma'ruf nahi munkar.[15]

Di era reformasi Deliar Noer membentuk suatu Partai yaitu Partai Umat Islam Indonesia (PUI), sekaligus menjadi ketua Umum dari Partai Umat Islam (PUI). Ketika itu, Deliar Noer banyak berkecimpung dengan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia. Pada era ini Deliar Noer juga mempunyai kedekatan hubungan dengan beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia diantaranya: Bj. Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie yang berlangsung tidak lama yaitu selama 436 hari. Habibie menyatakan bahwa dalam menghadapi cobaan yang menimpa bangsa Indonesia, yang diperlukan adalah rasa tulus ikhlas, apalagi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sesuatu hal yang sangat diingat oleh Deliar Noer dalam sebuah negara harus diperlukan suatu agama yang menjadi bimbingan dalam hidup bernegara, kemudian negara hendaknya mendekatkan masyarakatnya dengan agama serta moral.[16]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas permasalahan politik Islam dengan fokus pada pemikiran Deliar Noer tentang politik Islam yang kemudian penulis kemas dengan judul **"Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

---

[15]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar* Noer, …, hal. 959-966.

[16]Deliar Noer, *80 Tahun Deliar Noer*, Cet. I (Jakarta Selatan: Hilal Publishing House, 2007), Hal. 367-368.

1. Bagaimana kiprah Deliar Noer dalam kancah politik Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran politik Deliar Noer tentang politik Islam?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran Deliar Noer dalam politik Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kiprah Deliar Noer dalam kancah politik Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemikiran politik Deliar Noer tentang politik Islam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran Deliar Noer dalam politik Islam Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

   Untuk mengetahui pemikiran politik Deliar Noer dalam konteks politik Islam di Indonersia.

b. Manfaat Praktis

   1. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami politik Islam dalam konteks politik Islam di Indonesia.
   2. Sebagai sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terutama pemikiran politik mengenai politik Islam di Indonesia.
   3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman dan kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Pemikiran yaitu Cara atau hasil berfikir.[17] Ditinjau dari segi terminologi pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.

Politik adalah seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu negara yang mencakup beraneka ragam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisir serta cara bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.[18] Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kata politik sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap Negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).[19]

Deliar Noer adalah seorang doktor ilmu politik pertama di Indonesiayang mendapatkan gelar PhD. Deliar Noer dilahirkan di Medan pada tanggal 9 Februari 1926.[20]

---

[17]Wjs.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Hal. 753.

[18]B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hal. 518.

[19]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 687.

[20]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar* Noer,..., hal 1

F. Tinjauan Pustaka

Di beberapa tulisan yang telah ada, saat ini ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Deliar Noer sebagai pembanding di antaranya:

*Pertama,*Rosyidah, Nur Faidatur (2017) UIN Sunan Ampel Surabaya, *Kontribusi Deliar Noer terhadap penulisan sejarah gerakan islam tradisionalis dan modernis di Indonesia (1900-1942)* materi yang diteliti dalam skripsi ini berkaitan dengan riwayat hidup Deliar Noer, dalam satu karya Deliar Noer yang fenomenal yaitu Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 berpendapat bahwa perkembangan gerakan modern Islam itu terjadi karena adanya pergantian penguasa di Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang,dalam penelitiannya Deliar Noer menggunakan metode deskriptif analisis. Ia juga menggunakan pendekatan historis dan pendekatan sosiologis serta teori yang digunakan ada beberapa yaitu teori sosial, teori fungsionalisme dan teori modernisasi.

Kedua, Marto (2009) UIN Sunan Kalijaga *Pemikiran Deliar Noer Tentang Islam dan Gerakan Politik di Indonesia.* Ia menemukan bahwa Deliar Noer (1926-2008) merupakan sosok intelektual Islam yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan Islam dan kenegaraan, Deliar Noer sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pada masa Orde Lama gerakan Islam di gawangi oleh Masyumi, gerakan politik pada masa Orde Baru bisa dikatakan stagnan setelah dilarangnya PDII dan Parmusi. Pada era reformasi, dengan mewacanakan kembali dengan beragam partai yang beridentitas Islam, dengan mewacanakan kembali tentang pemberlakuan syari’at Islam dan untuk

mencantumkan kembali “tujuh kata” dari Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945.

Ketiga, Ismanizar, UIN Sumatera Utara, *Kepemimpinan negara menurut pandangan Deliar Noer,*hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan menurut Deliar Noer berkaitan dengan prinsip-prinsip etika politik kepemimpinan yang harus dijalankan dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan politik. Nilai-nilai kepemimpinan menurut Deliar Noer yaitu, *pertama,* pemimpin hendaknya sadar tentang kedudukannya sebagai *khalifah fi’l ardh*, yang memegang amanah, yang didasari oleh iman, Islam, dan ihsan, yang mempunyai akhlak yang baik. *Kedua,* nilai-nilai pada umumnya harus tergambar pada diri manusia dan mempunyai relevansi dengan nilai-nilai dasar Islam tentang dasar negara dalam bentuk yang ideal. Di samping itu, relevansi pemikiran Deliar Noer dengan pemimpin-pemimpin Indonesia di era reformasi salah satunya adalah Susilo Bambang Yodhoyono (SBY).

Yang menjadi dasar perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih menjurus kepada pembahasan pemikiran politik Deliar Noer dalam konteks politik Islam di Indonesia saat ini dan kondisi politik Islam Indonesia serta kondisi partai politik Islam di Indonesia, apakah partai tersebut adalah partai yang berazaskan Islam atau hanya menyebut dirinya sebagai partai Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research).* Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[21] Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berekenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang teliti. Adapun sumber data pada penulisan ini adalah *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar, Partai Islam di Pentas Nasional kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965, 80 Tahun Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik Karya Deliar Noer,* dan Karya Deliar Noer lainnya yang sekaligus menjadi sumber data primer penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data Primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengan pembahasan yang penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi yang

[21] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, Hal. 3.

diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis,* yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, karya tulis kemudian akan diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal merupakan suatu kaidah dalam penulisan karya ilmiah untuk memudahkan pembaca memahami sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika penulisan proposal ini terbagi kedalam lima bab:

BAB I, merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran bagi penulis dalam menulis karya ilmiah ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan pandangan umum tentang politik Islam Indonesia yang meliputi pengertian politik Islam/siyasah, pengertian politik Islam di Indonesia, tokoh-tokoh politik Islam Indonesia, sejarah gerakan politik Islam di Indonesia, dan gerakan politik Islam di Indonesia.

BAB III, merupakan biografi Deliar Noer yang membahas mengenai riwayat hidup dari masa kecil sampai perjalanan hidup Deliar Noer, Pendidikan Deliar Noer danAktifitas politik serta karya-karya Deliar Noer.

BAB IV, merupakan pembahasan mengenai pemikiran politik Deliar Noer dalam konteks politik Islam di Indonesia yang terdiri dari perjalanan politik Deliar Noer dalam kancah politik Islam Indonesia, politik Islam di Indonesia dalam pemikiran Deliar Noer, dan kontribusi pemikiran politik Islam Deliar Noer dalam konteks politik Islam di Indonesia dan analisa penulis terhadap pemikiran politik Islam Deliar Noer di Indonesia.

BAB V, merupakan penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB II

POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Politik Islam/ Siyasah

Politik dalam bahasa arab disebut *siyasah*, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *polities.* Secara etimologi kata "politik" berasal dari bahasa yunani, yaitu dari perkataan "polis" yang dapat mempunyai arti kota dan negara kota. Kata "polis" tersebut berkembang menjadi kata lain seperti "politis" yang berarti warga negara dan "politikus" yang berarti kewarganegaraan *(civic).*[1]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "politik" diartikan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3) Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).[2]

Kata *siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, (**سيا سية – سا س – يسو س – سيا سة**) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), daan memerintah (*sturen*), seperti penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. *Siyasah* berarti juga pemerintahan

[1]Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Politik: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu politik dalam megubah politik biadab menjadi politik beradab,* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hal.57.

[2]Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 886.

dan politik atau pembuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.[3]

Kata *saasa* mengandung pengertian yang sama dengan kata *dabbara* (mengatur), atau sinonim dalam bahasa Inggris dengan kata *to government* (memerintah), *to lead* (memimpin), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah). Atas dasar itu, kata *siyasah* dapat diartikan sebagai politik atau penetapan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.[4]

Secara linguistik, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.[5]

Secara terminologis dalam *Lisan Al-'Arab, siyasah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkan.

Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri,

---

[3]Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hal.75.

[4]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 5.

[5]Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),* (Bandung, Pustaka Setia: 2012), hal. 16.

serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Sedangkan secara istilah pengertian *siyasah* oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang menyatakan, *siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Menurut Suyuti Pulungan, *siyasah* adalah kepentingan-kepentingan *(mashalih)* umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.[6]

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepntingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-qur'an maupun As-Sunnah.

Dari beberapa arti *siyasah* tersebut di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dari penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.[7]

---

[6]Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),*…,hal. 17.
[7]Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, ..., hal. 75.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan masyarakat;
2. Pengendalian hidup bernegara;
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
5. Pengaturan hubungan antarnegara;
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara. [8]

Dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah politik/*siyasah* berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dengan skala kecil, maupun dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala internasional dan meliputi bagaimana ia (kekuasaan) itu diperoleh dan bagaimana ia dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara di mana ia diterapkan. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

B. Konsep Politik Islam di Indonesia

Kajian tentang Islam dan politik di Indonesia adalah kawasan kajian yang tidak pernah basi. Dimulai oleh orientalis besar C. Snouch Hurgronje sekitar 1 abad yang lalu, diteruskan oleh Indonesianis asing dan pribumi seperti H. J.

[8]Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, …,hal. 19.

Benda, Allen Samson, Donal Emmerson, Deliar Noer, Taufik Abdullah dan lain-lain pada periode pasca Perang Dunia II. Dalam dua dekade terakhir muncul tulisan-tulisan masalah yang sama oleh penulis muda Muslim, seperti M. Syafii Anwar, "Negara, Umat dan Ijtihad Politik" dalam Panjimas No. 693 (21-31 Agustus 1991) halaman 30-31. Posisi umat itu seperti air ia bergerak dan merembes ke berbagai penjuru, dan membasahi apa dan siapa saja. Syafii termasuk kelompok mereka yang tidak pesimis menatap wajah Islam Indonesia pada masa yang akan datang. [9]

Partai-partai politik Islam sudah mulai muncul sejak zaman penjajahan, tetapi pada waktu itu, sebagaimana partai-partai politik bukan Islam perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada hakikatnya partai-partai Islam pada waktu itu merupakan partai-partai nasionalis dengan perbedaan pada keanggotaan partai-partai Islam hanya terdiri dari orang-orang yang beragama Islam saja. Bahkan sampai pada tahun-tahun pertama kemerdekaan penonjolan Islam oleh partai-partai politik Islam baru terbatas sebagai syiar, simbol, atau slogan, tanpa uraian yang rinci. Misalnya PSII dalam kongresnya mengesahkan suatu revolusi bahwa partai tersebut memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan Islam.[10]

Ketika peminggiran politik Islam mencapai puncaknya dengan diberlakukannya asas tunggal yang berarti juga melemahnya gerakan politik

---

[9] Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia,* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994), Hal. 200

[10]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hal. 189.

pemikiran politik Islam di Indonesia antara simbolistik dan substantivistik Islam yang bersifat formalistis dan legalistis mendorong sebagian dari mereka untuk merumuskan kembali makna dan strategi politik Islam lebih jauh. Dengan dipersempitnya ruang gerak bagi politik Islam dalam bentuk formal, dijadikan peluang untuk memasuki wilayah politik melalui jalan lain yang dipandang masih sangat terbuka. Mereka menganggap perlu mengakomodasi gagasan pemerintah untuk mengikis kecurigaan antara Islam dan negara. [11]

Realitas politik Islam yang dipandang gagal memotivasi umat Islam, terutama kalangan cendekiawan mudanya yakni mencari rumusan baru politik agar dapat berperan dalam negara. Salah satunya adalah melakukan reorientasi terhadap makna politik Islam yang selama itu dielaborasi dalam corak legalistis dan formalistis. Orientasi politik baru tersebut lebih mengarah kepada politik substantif dan integratif artinya pendekatan baru mengutamakan kandungan nilai Islam sebagai sumber inspirasi bagi kegiatan politis serta sikap saling menerima dan menyesuaikan antara umat Islam dan negara. [12]

Namun demikian, sekalipun politik Islam Orde Baru sudah mengalami perubahan yang sangat fundamental, akan tetapi bagaimana mencari bentuk artikulasi kepentingan Islam yang tepat dalam rangka meningkatkan tujuan perpolitikan Islam, masih tetap menjadi pekerjaan rumah umat Islam. Perjalanan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pasang surut. Awal berdirinya Orde Baru, tumbuh semangat baru umat Islam untuk kembali

[11] https://ejornal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf. Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 19.35.

[12] https://ejornal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf. Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 19.05

menghidupkan gagasan politik mereka. Pemikiran di atas, memberikan corak Islam di Indonesia beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga sekarang, tampak berubah-ubah. Jika indikasi politik yang digunakan, maka proses pergeseran (politis) dalam hubungan antara Islam dan negara dapat diamati dengan jelas. [13]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ke Indonesiaan, hubungan Islam dan negara juga mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Adakalanya upaya umat Islam ini terakomodasi dalam ruang publik, namun tidak jarang pada saat-saat tertentu upaya tersebut dicurigai oleh penguasa.

Pada masa Indonesia Modern, hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan, umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung, namun kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik waktu itu. Pada era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa, bahwa kalau mereka memberi kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang akan membahayakan bangunan bangsa Indonesia majemuk.

[13]https://ejornal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf. Diakses 30 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB

C. Sejarah Gerakan Politik Islam di Indonesia

1. Politik Islam Menjelang Kemerdekaan

Umat Islam memegang peranan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di berbagai wilayah Nusantara dapat dikatakan sebagai perlawanan Islam terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Ini juga berarti bahwa perlawanan tersebut merupakan upaya yang tidak kenal menyerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam dalam arti luas karena Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Karena itu, pada periode awal abad ke-20 berdiri organisasi-organisasi Islam, baik yang bergerak di bidang politik maupun sosial keagamaan. Di antara yang dapat dicatat, antara lain Sarekat Islam (1912) yang berasal dari Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammaduyah (1912), Persatuan Islam (1920-an), Persatuan Muslimin Indonesia (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Dari perkembangan organisasi-organisasi Islam ini setidaknya ada dua fenomena yang terjadi pada dekade-dekade awal abad ke-20 tersebut.[14]

Pertama, berdirinya organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberi pendidikan politik bagi umat Islam supaya mereka mengerti dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini terlihat umpamanya dari berdirinya organisasi SI, Permi dan PSI.

[14]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 271.

Kedua, ada juga organisasi yang berdiri dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengadakan pembaruan pemikiran keagamaan dalam Islam, seperti Muhammadiyah dan Persis. Gerakan organisasi modern ini akhirnya mendapat respons dari kalangan tradisi untuk mempertahankan pendirian mereka dengan mendirikan NU dan Perti. [15]

Di antara kebijakan Jepang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam adalah pembentukan kembali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 5 September 1942. Federasi ini berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada akhir tahun 1943. Jepang juga membentuk *shumubu* (Kantor Urusan Agama).

Pada saat kekuatan Jepang semakin melemah karena kekalahan-kekalahannya dalam perang melawan Sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Maka pada Desember 1944, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau *Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai*). Untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia dalam BPUPKI ini dikaji masalah-masalah dasar negara, hubungan antara kepala negara, kabinet dan parlemen ditelaah.[16]

Di BPUPKI ini pengalaman pertama perdebatan ideologis dalam tataran praktis terjadi ketika akan menyusun dasar negara bagi Indonesia pada 1945, beberapa bulan menjelang kemerdekaan. Dalam sidang-sidangnya, para pengusung Islam sebagai dasar negara berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler yang netral agama dan kelompok kebudayaan Jawa Tengah, termasuk dua

[15]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965,* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hal. 24-26.

[16]Deliar Noer, *Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965,*…,hal. 30.

kerajaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan kelompok terakhir ini pernah mengadakan rapat tertutup di Magelang untuk membicarakan pembentukan kerajaan (Indonesia) dengan sultan Yogyakarta sebagai kepala negaranya. Namun demikian, mereka akhirnya sadar bahwa ide ini akan mengalami resistensi yang lebih kuat dan mereka lebih memilih untuk bergabung dengan kekuatan kelompok nasionalis netral agama.[17]

Penulis dapat menyimpulkanm bahwa pada awal kemerdekaan Indonesia, umat Islam mengalami kegagalan dalam perjuangan mereka menjadikan Islam integral dalam kehidupan berbangsa. Pada awalnya syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara tetapi umat Islam harus rela mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan yang lain, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang sebagaimana pandangan para tokoh Islam rumusan tersebut mencerminkan ekspresi tauhid umat Islam, namun sebagian dari merasa kurang puas sehingga mereka berupaya secara terus menerus untuk memperjuangkannya.

2. Politik Islam Era Demokrasi Liberal

Era demokrasi liberal ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat 3 November 1945. Maklumat X berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke bentuk parlementer. Adapun Maklumat 3 November 1945 berisi tentang diberinya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai-partai guna menyalurkan aspirasi politiknya. [18]

---

[17]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*,…,hal. 275.

[18] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 278.

Sebagaimana diharapkan tokoh-tokoh Islam, pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan secepatnya setelah Indonesia merdeka. Namun, karena pada awal kemerdekaan, pemilu yang diimpikan tokoh Islam masih belum dapat dilaksanakan. Meskipun Bung Hatta telah menandatangani maklumat pembentukan partai-partai, suasana politik Indonesia masih diliputi pergolakan. Belum lagi PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun pada 1948, justru pada saat-saat gentir ketika Belanda melancarkan agresinya untuk menguasai Indonesia kembali. [19]

Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 diselenggarakan di bawah naungan UUDS tahun 1950. Demokrasi ini disebut demokrasi parlementer karena cabinet pada masa ini tidak bertanggungjawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen. Sesuai dengan semangat liberalisme dunia politik Indonesia, maka peserta pemilu 1955 sangat banyak yaitu 29 partai politik.[20]

Dari pemilu ini ada tiga ideologi yang memperoleh suara terbesar dan bersaing di Konstituante. Ketiganya yaitu, Islam, Nasionalis, dan Komunis.di kalangan Islam partai-partai yang meraih suara dan kursi di Konstituante antara lain: Masyumi, NU, PSII. Meskipun partai-partai Islam bersaing dalam memperebutkan pengaruh, mereka memiliki suara bulat untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.[21]

---

[19]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 281.

[20]Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994), hal. 165.

[21]https://www.researchgate.net/publication/313653384_Ideologi_Gerakan_Politik_Islam_di_Indonesia, Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 21.15 WIB

Keluarnya dekrit Presiden menandai gagalnya kembali upaya umat Islam untuk melakukan Formalisasi Islam ke dalam ketatanegaraan di Indonesia. Perjuangan tokoh-tokoh Islam yang dijamin secara konstitusional dalam wadah Konstituante berakhir dengan kekecewaan oleh keputusan sepihak Soekarno yang mengeluarkan dekret. Pada dasarnya pemberontakan ini bukan ingin melepaskan diri dari NKRI, melainkan ingin menggugat kebijakan pemerintah ketika itu yang kurang memerhatikan daerah dan memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menguasai politik Indonesia. Bagi Soekarno, pemberontakan ini menjadi salah satu alasan untuk membubarkan organisasi politik Islam modern tersebut. [22]

3. Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin

Era ini ditandai dengan dikeluarkannya dekrit oleh Soekarno yang kemudian dikenal sebagai era demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno dalam pidatonya menjelaskan butir-butir pokok demokrasi terpimpin dalam dua kategori: (1) tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara, (2) tiap-tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi terpimpin yakni yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Demokrasi kekeluargaan seperti yang dimaksudkan adalah mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang ‘sesepuh’ seorang tetua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Kenyataannya dalam

[22]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 284.

menjalankan pemerintahan yang terjadi adalah suatu kediktatoran dan sewenang-wenang. Karena Soekarno terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia.[23]

Sebelum Masyumi tersingkir dari pentas sejarah Indonesia modern, ia dan PSI telah disingkirkan dari DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yaitu suatu badan perwakilan rakyat yang dibentuk Soekarno untuk mengganti DPR. Setelah bubarnya Masyumi, perpolitikan Islam diwakili sepenuhnya oleh Liga Muslimin dengan NU sampai sistem Demokrasi Terpimpin itu sendiri berakhir tahun 1965 dan di awali dengan peristiwa G30S/PKI.[24]

Perjuangan politik Islam di periode ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tiga faktor utama. *Pertama,* di kalangan partai Islam tidak terdapat kata sepakat dalam menghadapi perkembangan politik saat itu. Pertentangan antara Masyumi dan NU yang sebenarnya dapat diredusir pada era demokrasi liberal ketika mereka sama-sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara pada era demokrasi terpimpin kembali menajam. Partai-partai Islam menghadapi dilema antara idealisme politik dan kenyataan riil di lapangan. *Kedua,* dari sudut historis, perpecahan ini tidak lepas dari pertentangan paham antara kelompok modernis dan tradisionalis yang sudah berjalan terutama sejak pertengahan abad ke-19. Masyumi adalah partai politik Islam modernis yang memiliki pemikiran politik dan mekanisme organisasi teratur dan modern. Pada umumnya, tokoh-tokoh Masyumi merupakan lulusan pendidikan Barat yang memiliki komitmen keIslaman yang kuat. Bagi mereka aplikasi dan pelaksanaan

[23]Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, …*, Hal. 175.
[24]Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, …*, Hal. 177.

kesepakatan bersama yang merupakan cita-cita demokrasi adalah syarat mutlak dalam etika dan cita-cita politik. *Ketiga,* perpecahan di tubuh partai-partai Islam dibaca dengan sangat jeli oleh Soekarno. Karenanya ia memainkan politik belah bambu; mengangkat yang satu dan menginjak yang lainnya. Soekarno membela NU dan partai-partai tradisional lainnya sebagai salah satu pilar penopang kekuasaannya.[25]

4. Politik Islam Era Orde Baru

Gagalnya pemberontakan G-30-S/PKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut orde baru yang ditandai dengan pemberian mandat yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang diakibatkan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut. Soekarno dengan ABRI (sekarang TNI) dan bantuan umat Islam akhirnya berhasil menguasai keadaan. [26]

Pada awalnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memberikan harapan di kalangan umat Islam. Bangsa Indonesia ingin menapaki kembali kehidupan bernegara yang normal, lebih etis, dan demokratis. Bagi Masyumi kehadiran Orde Baru diharapkan menjadi "lampu hijau" bagi tampilnya kembali kekuatan Islam politik. Sejalan dengan perkembangan Orde Baru, umat Islam menyusun rencana bagi tampilnya Islam politik untuk memperjuangkan aspirasi syariat Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Namun mereka

[25]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 292.

[26]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 293.

mendapatkan hambatan pemeritah orde baru yang didukung sepenuhnya oleh militer tidak bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan para eksponennya untuk terlibat dalam politik praktis. Kalangan militer menganggap bahwa beberapa tokoh Masyumi memiliki kesalahan yang tidak termaafkan karena terlibat dalam pemberontakan PRRI.[27]

Menurut Kuntowijoyo, pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak pemerintah merasa berutang budi kepada kaum Muslim karena partisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis tetapi di pihak lain mereka menentang munculnya komunitas-komunitas Muslim yang kuat secara politik. Akibatnya, mereka menolak upaya untuk menghidupkan kembali partai Islam Masyumi. Sebagai balas budi kepada umat Islam berdasarkan keputusan Presiden Nomor 70 pemerintah Orde Baru mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi, 20 Februari 1968) sebagai penyaluran aspirasi politik umat Islam. Namun karena bukan merupakan suara dari bawah partai ini pun tidak berdaya berada dalam kooptasi pemerintah. Partai ini terus-menerus dirundung konflik dan selalu berada dalam campur tangan pemerintah.

Selain Parmusi masih ada Partai NU, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), di samping Golongan Karya (partai pemerintah) dan partai-partai lain yang beraliran nasionalis maupun Kristen. Pada 1971, pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilu pertama kekuasaannya yang diikuti oleh tiga arus kekuatan politik saat itu. Kekuatan Islam diwakili oleh

[27] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 294.

Parmusi, NU, PSII, dan Perti, kekuatan nasionalis dan Kristen yang diwakili PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik serta kekuatan nasionalis-pemerintah yang diwakili oleh Golkar. Dalam pemilu pertama Golkar menang mutlak mengantongi 62, 11 % suara.[28]

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dinamika politik Islam Indonesia dalam penerapan ajaran Islam mengalami pasang surut. Selama tiga periode perjalanan bangsa Indonesia sejak masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan Orde Baru, umat Islam merasa belum memperoleh hasil yang optimal dari perjuangannya. Ketika Orde Baru jatuh pada Islam dalam segi-segi tertentu, juga merasakan dampaknya. Ini terlihat antara lain dari merosotnya peran dan keberadaan ICMI serta Koran *Republika,* yang dianggap sebagai corong bagi kepentingan Umat Islam.

5. Politik Islam Era Reformasi

Seiring dengan kejatuhan Orde Baru, umat Islam memanfaatkan momentum *euphoria* reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Puncak gerakan reformasi terjadi dengan bergeraknya mahasiswa ke gedung MPR/DPR menuntut Soeharto mundur.

Pengangkatan Habibie sebagai presiden menandai berawalnya era baru bangsa Indonesia. Presiden Habibie membuka keran demokrasi yang selama ini tersumbat dan memberikan kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan

[28] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 297.

beragam ideologi dan membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto. Hal lain yang dilakukan Habibie adalah kesediannya untuk mempercepat pemilihan umum dan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membentuk partai. Antusiasme masyarakat dalam mendirikan partai sangat besar sekali. Hal ini ditandai dengan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu ada 48 partai. Ini sudah termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berganti asas kepada Islam dan tanda gambar kembali kepada Ka'bah. Masing-masing partai nemiliki visi, misi, *platform,* dan ciri khasnya. Dari 48 partai tersebut sebagian besar menganut Pancasila sebagai asas, sebagian menganut Islam, satu menganut asas demokrasi religious (Partai Uni Demokrasi Indonesia pimpinan Sri Bintang Pamungkas) dan satu menganut asas sosial demokrasi kerakyatan (Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko).[29]

Pada Pemilu 1955 terdapat partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan PSII, maka pada era awal reformasi terdapat belasan partai yang mengaku memiliki hubungan historis dengan partai-partai tersebut. Di kalangan NU terdapat beberapa partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan KH. Yusuf Hasjim, Partai Nadhlatul Ummat (PNU) pimpinan K.H. Sjukron Makmun, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

[29]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 314-315.

pimpinan Matori Abdul Jalil. Namun dari semua partai berbasis NU tersebut, hanya PKB yang diakui oleh Abdurrahman Wahid sebagai parati resmi NU. Partai yang berbasis Masyumi ada tiga partai yang memiliki hubungan emosional dan psikologis pada 1955, yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII-Masyumi) pimpinan Abdullah Hehamahua, Partai Masyumi Baru (PMB) pimpinan Ridwan Saidi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusri Ihza Mahendra.[30]

Selain partai-partai yang memiliki kaitan historis dengan partai-partai Islam era 1955, ada pula partai-partai Islam lain yang baik secara tegas menyebutkan Islam sebagai asasnya maupun yang mayoritas konstituennya umat Islam. Untuk kelompok pertana terdapat Partai Umat Islam (PUI) pimpinann Deliar Noer, Partai Keadilan (PK) pimpinan Nur Mahmudi Ismail, dan Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) yang dipimpin oleh Syamsahril. Sementara partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi namun berbasis massa muslim adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh M. Amien Rais dan Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) pimpinan H. Anwar Junus.

Demikianlah partai-partai Islam yang lahir pada era Reformasi 1998. Keran demokratisasi yang dibuka lebar-lebar oleh Presiden Habibie dimanfaatkan seluas-luasnya oleh umat Islam untuk mengikuti pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu terdapat 16 partai Islam atau yang berbasis massa umat Islam. Dengan jumlah yang sebesar itu partai-partai Islam berusaha mendulang suara umat Islam

[30]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 316.

sebesar-besarnya. Namun jumlah partai Islam yang besar tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Terbukti pada pemilu 1999 partai-partai Islam tidak dapat berbuat banyak. Partai-partai Islam memperoleh suara dan kursi di DPR RI yang kecil. PBB memperoleh 13 kursi, PK 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Dengan demikian, total kursi partai-partai Islam adalah 169 kursi.[31]

Dalam perkembangan politik selanjutnya ketika proses pemilihan Presiden RI di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam poros tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi Amien Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi perseteruan yang memanas antara calon presiden Habibie dari partai Golkar dan Megawati Soekarno Poetri yang diusung oleh PDI-P. Amien Rais bersama partai-partai Islam lainnya dalam sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahakan Megawati.

Megawati berhasil memperoleh suara terbanyak dengan mengalahkan pesaingnya Hamzah Haz. Duet Wahid-Mega ini bisa dianggap sebagai rekonsiliasi antara Islam moderat dengan kubu nasionalis.

Salah satu peran penting Megawati adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum kedua pada masa reformasi hasil final verifikasi faktual KPU telah menetapkan 24 partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu 2004. Dari 24 partai politik itu ada lima partai Islam yakni PPP (Hamzah

[31]Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …,hal. 317.

Haz), PBB (Yusril Ihza Mahendra), PKS (Hidayat Nur Wahid), PBR (K.H Zainuddin MZ), dan PPNUI (K.H. Syukron Ma'mun), di samping PA yang memiliki basis massa organisasi Muhammadiyah dan PKB yang basis konstituen tradisionalisnya dari kalangan NU.

Pemilihan presiden tahun 2004 dilangsungkan pemilu secara langsung sesuai dengan amanat UUD1945 yang telah diamandemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-M.Yusuf Kalla, M. Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, Megawati-Hasjim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut, NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Solahuddin wahid di posisi wakil presiden.

Pemilu ini berlangsung dua putaran, yaitu pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasjim. Selanjutnya putaran kedua pasangan SBY-Kallla akhirnya dapat memengangi pertarungan menuju kursi RI 1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu langsung ini, partai-parttai Islam lebih suka merapat kepada pasangan SBY-Kalla. Sebagai imbalan, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu partai-partai pendukung tersebut memperoleh jatah menteri.[32]

Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60 persen suara. Kemenangan SBY-Boediono ini juga dapat dukungan sebagian

[32] Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, …, hal. 323.

besar partai-partai Islam. Partai-partai seperti PKS, PPP, PBB, dan PAN adalah beberapa partai yang ikut berjuang memenangi pasangan SBY-Boediono.

Dari uraiain tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ke Indonesiaan, hubungan Islam dan negara juga mengalami dinamika dan perkembangan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berusaha memberi kontribusi berharga bagi perkembangan kenegaraan Indonesia. Adakalanya upaya umat Islam ini terakomodasi dalam ruang publik, namun tidak jarang pula pada saat-saat tertentu upaya tersebut dicurigai oleh penguasa.

Pada masa Indonesia modern hubungan Islam dan kekuasaan mengalami perkembangan yang menarik. Pada era awal kemerdekaan umat Islam dengan leluasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan politik Islam yang mereka usung, namun kandas terbentur oleh kondisi sosiopolitik waktu itu. Pada era berikutnya Islam dianggap sebagai kekuatan yang dicurigai. Ada ketakutan dari penguasa bahwa kalau mereka memberi kesempatan kepada politik Islam untuk berkembang akan membahayakan bangunan bangsa Indonesia majemuk.

D. Tokoh-tokoh Politik Islam Indonesia

Berikut adalah tokoh-tokoh politik Islam di Indonesia, di antaranya:

1. Mohammad Natsir

Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Natsir adalah tokoh Islam terkemuka Indonesia pernah menjabat

sebagai perdana menteri kelima Republik Indonesia dan merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi.[33]

Di era orde baru Natsir berharap agar pemerintah memberi angin peluang kepada umat Islam dan juga merehabilitasi Masyumi, tetapi kenyataannya Presiden Soeharto merasa takut apabila Masyumi bangkit kekuatan Islam akan bisa menguat. Natsir turut membantu pemerintahan Orde Baru sekurang-kurangnya dalam tiga hal: (1) memperlancar hubungan dengan negara Timur Tengah (dengan memberi *kattebelletje* nota kecil untuk kemudahan berhubungan dengan Ali Moertopo seorang Asisten pribadi presiden, (2) mempermudah normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia.[34]

Pada tahun 1967, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Melalui DDII Natsir juga pernah menduduki jabatan di berbagai organisasai Islam dunia, seperti *Word Muslim Congress,* Rabitah Islamiyah (1969), Anggota Dewan Masjid Sedunia, mendidik calon-calon juru dakwah, dan mengirimkannya ke seluruh pelosok Indonesia.[35]

Menurut Natsir pancasila bukanlah lawan Islam tetapi di dalam pancasila terkandung ajaran Islam tetapi tidak identik dengan Islam. Menurutnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi *point of reference* bagi keempat sila lainnya, bukan sebatas rasa adanya ciptaan manusia yang relatif. Natsir mulai terlibat dalam polemik tentang Islam dan kebangsaan pada tahun 1931, ketika

---

[33]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_natsir Diakses pada 28 Oktober pukul 21.53 WIB

[34]Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa,* (Bandung, Mizan Anggota IKAPI, 2001), hal. 187.

[35]Herry Muhammad, dkk. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) cet.1, hal 49-52.

berusia 23 tahun dengan menggunakan nama samaran sebagai IS. Ia menegaskan *"Islam merupakan suatu peraturan pergaulan hidup yang memberi hak sama rata, memberi kewajiban sama berat atas segenap manusia penduduk alam ini. Peraturan mengangkat budi pekerti… mengurus rumah tangga… mengurus pergaulan dalam negeri… mengurus pemerintahan dan kerajaan…mengurus perhubungan dengan mereka yang berlainan negeri… mendidik dan memimpin tubuh dengan semangat, pencapai derajat kemanusiaan yang sepenuh-penuhnya".*[36]

Berbicara tentang agama dan negara Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno. Menurut Soekarno agama mesti dipisahkan dari negara dengan mengutip di antaranya adalah Syeikh Ali Abdur Raziq, seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, bahwa Al-Qur'an dan sunnah maupun ijma ulama, tidak ada keharusan adanya bersatunya negara dengan agama. [37] Natsir menilai pemikiran Soekarno itu keliru menurutnya agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dari negara. Urusan negara adalah bagian dari menjalankan perintah Allah bagi Natsir negara bukanlah segala-galanya tetapi merupakan alat ukur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[38]

Natsir membenarkan bahwa Islam memang bersifat *demokratis,* tetapi sama sekali tidak berarti bahwa semua hal termasuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam masih perlu dikukuhkan atau ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemungutan suara. Dengan kata lain,

---

[36]Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 215.

[37]Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik, Edisi Baru,…, hal.* 196.

[38]Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hal. 191.

permusyawaratan itu hanya hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya dan mencari cara terbaik untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan.[39]

Natsir bersama dengan Jenderal (Purn) Nasution, tokoh PNI lama, H.M. Sanusi Hardjadinata, mengemukakan keprihatinan mereka terhadap perkembangan keadaan negara Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri, ia berharap organisasi tersebut bisa berperan positif untuk perbaikan Indonesia. [40]

2. K.H. Hasyim Asy'ari

K.H. Hasyim Asy'ari lahir di Jombang Jawa Timur, 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang Jawa Timur 25 Juli 1947. K.H. Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh nasional pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. [41] Tahun 1899 kiai Hasyim bersama beberapa kiai lainnya mendirikan Pondok Pesatren Tebuireng. Kiai Hasyim pernah menjadi Ketua Umum MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan Ketua Dewan Syuro Masyumi. Lewat partai politik inilah kiai Hasyim memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan umat manusia sebagaimana cita-cita Islam.[42] Kiai Hasyim punya pandangan bahwa Islam tidak hanya membimbing manusia untuk menyembah satu tuhan, tapi ia merupakan agama yang memajemukkan aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat. Islam

[39]Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, …,hal. 193.
[40]Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa*,…, hal. 199.
[41]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Asy%27ari27ariDiakses pada 30 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
[42] https://alif.id/read/aguk-irawan-mn/sejarah-singkat-kh-m-hasyim-asyari-b2190666p/ Diakses tanggal 30 Oktober 2019m pukul 20.25 WIB

menurut kiai Hasyim sangat menghargai persaudaraan dengan menanggalkan simbol-simbol status, seperti ekonomi, pendidikan, dan ras.[43]

3. Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang Banten, 28 Februari 1911 meninggal di Jakarta 15 Februari 1989. Sjafruddin adalah seorang pejuang kemerdekaan, menteri dan pernah menjabat sebagai sebagai ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia.[44]

Sjafruddin menganjurkan sosialisme, tetapi bukan berdasar historis materialisme dan sistem kelas. Melainkan berdasarkan kewajiban manusia terhadap manusia dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Dalam waktu yang sama ia menjamin keadilan sosial serta milik seseorang. Dalam hal ini Sjafruddin melihat bahwa sosialisasi perlu dilaksanakan tetapi harus dengan dihubungkan dengan kondisi dan situasi. Bila alat-alat pemerintah belum tersusun dengan baik dan para pegawai masih belum mencukupi untuk menyediakan keperluan rakyat. Memperluas masalah ini pada kedua kekuatan dunia, Sjafruddin mengemukakan keyakinan bahwa Islam akan menjadi juru damai di antara raksasa-raksasa yang masing-masing mencoba memusnahkan jawabannya dengan senjata-senjata yang paling dahsyat, juru damai tetapi juga…pemenang.[45]

Sjafruddin dengan penuh kesadaran memasuki partai Islam Masyumi, ia berusaha mendasarkan sikap, tingkah laku, dan pandangannya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi saw. ia melihat usahanya dalam mendirikan PDRI sebagai

[43]Herry Muhammad, dkk. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, …,hal. 23-27.

[44]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sjafruddin_Prawiranegara, Diakses pada 30 29 Oktober 2019 pukul 10.15 WIB

[45]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis perkembangan Politik Indonesia 1945-1965,* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1987), hal. 143.

cermin dari imannya kepada Allah SWT, tetapi ia juga melihat usahanya dalam menegakkan PRRI untuk menentang rezim orde lama sebagai lanjutan imannya. [46]

Pada tahun 1980, Sjafruddin turut dalam penandatanganan "Pernyataan Keprihatinan" terkenal dengan Petisi 50 untuk mendesak wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR menanggapi pidato presiden tanggal 27 Maret dan 16 April 1980. Tentang dakwah Islam menurut Sjafruddin bahwa dakwah Islam tidak bisa dilepaskan dari soal-soal politik, soal-soal kenegaraan. Sjafruddin mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (Husami) pada tahun 1967 dan suatu yayasan dengan nama Yayasan Dana dan Tabungan Haji dan Pembangunan (YDTHP) untuk membantu mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. [47]

E. Gerakan Politik Islam di Indonesia

1. Syarikat Islam

Syarikat Islam (SI) sejak berdirinya merupakan organisasi gerakan politik juga merupakan gerakan politik yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II. SI merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Indonesia (SDI) didirikan tahun 1912 oleh H. Samanhudi, seorang pengusaha batik di kampong Lawen, Solo. Tujuan utama SI adalah menghidupkan kegiatann ekonomi pedagang Islam Jawa yang diikat dengan agama. [48]

Perubahan SDI menjadi SI bukan hanya dalam perubahan nama, tetapi perubahan orientasi yaitu dari komersial ke politik. Selama periode awal SI mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia. Hanya dalam tempo singkat SI

[46]Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2001), hal. 212.

[47]Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, …, hal. 218.

[48]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 33.

telah berkembang dengan cepatnya. Dalam mengamati fenomena gerakan modernis Islam di Indonesia, antropologis Inggris, Leslie H. Palmier, mengambil kesimpulan yang kurang cermat. [49]

Perkembangan Syarikat Islam yang semakin membesar ini membahayakan posisi pemerintah yang menimbulkan reaksi yang cepat dari pihak pemerintah. Gubernur Jenderal W. F. Indenburg menyadari ancaman yang dibawa SI terhadap kekuasaan colonial mengenai reaksi terhadap makin luasnya keanggotaan SI, Indenburg berpendapat menjadi jalangnya SI merupakan kenyataan bahwa orang Bumi Putera mulai memikirkan nasibnya.

Menurutnya melarang begitu saja tidak ada gunanya apalagi dengan tekanan dan penindasan. Jalan terbaik baginya adalah membuat kuanalisasi artinya mengurangi desakan kuat sehingga tidak timbul satu kekuatan besar yang dapat menghancurkan eksistensi pemerintah. Hal ini dijabarkan dalam pemberian badan hukum *(rechtpersoon)* kepada SI, sedangkan Central Sarikat Islam (CSI) baru akan diberikan kemudian. Artinya bahwa hanya cabang lokal yang diakui secara resmi dan hubungan antar cabang dan kordinasi dari CSI diperlemah. [50]

Marxisme atau kemudian lebih dikenal dalam baju Komunisme, pertama kali diperkenalkan oleh tokoh-tokoh Marxisme Belanda yang diketuai H. J. F. sneevliet. Pada tahun 1914 kelompok ini mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeninging*, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda) dan

[49]Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hal. 108.

[50]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, ...,* Hal. 35.

kemudian gagasan-gagasan dan slogan-slogan Marxisme di ekspor ke dalam tubuh SI. [51]

Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV di ubah menjadi PKI (dalam bahasa belanda *Partij der Kommunisten in Indie,* Partai Komunis Indonesia), dengan SI cabang Semarang sebagai pusatnya. Strategi dasar PKI ialah bagaimana menghancurkan pengaruh tokoh-tokoh SI dan membawa SI secara keseluruhan melalui infiltrasi ke dalam kamp komunis. Penetrasi Ideologis ini berlaku ketentuan bahwa tidak dipernolehkannya merangkap dengan anggota partai lain. Maka banyaklah cabang Syarikat Islam yang lain jatuh ke bawah dominasi komunis dan banyak diantaranya menyebut dirinya sebagai SI merah, nama SI masih digunakannya untuk mengelabui massa Muslim. Selama hanya satu dasawarsa PKI telah muncul sebagai partai komunis terkuat di Asia.[52]

Kevakuman politik-intelektual yang ditinggalkan PKI sesudah 1927 segera diisi oleh nasionalisme sekuler yang dipelopori Soekarno dan kawan-kawannya. Pada 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), tuntutannya jelas "kemerdekaan Indonesia" ini bermakna kata Hatta pada 1934"ia menyentuh tali jantung setiap orang yang punya perasaan". Kelahiran partai baru ini bagi SI hanyalah samakin melemahkan posisi politiknya. SI tidak lagi mengeluarkan isu-isu yang menarik. SI seakan-akan telah kehabisan tenaga pada tahun 19727 sampai 1930, politik Indonesia dikuasai oleh nasionalis sekuler. Namun Soekarno bersama tokoh-tokoh nasionalis sekuler lainnya ditangkap polisi

[51]Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*, …, hal. 110.

[52]Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*, …, hal. 122.

kolonial karena kegiatan politiknya pada akhir tahun 1927. Tidak lama setelah itu PNI malah dibubarkan sendiri oleh tokohnya Mr. Sartono.[53]

Menurut penulis berdirinya Syarikat Islam menunjukkan eksistensi umat Islam dan wajar apabila organisasi ini dapat berperan sampai sejauh itu karena berbagai basis kekuatan politik Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Syarikat Islam menjadi jawaban atas problematika penindasan kaum penjajah. Dari sini penulis berpendapat bahwa massa besar yang menyertai Syarikat Islam selama masa pembentukannya belum tentu karena faktor Islam semata-mata, tetapi lantaran sikap antikolonial yang ditunjukkan SI dan Islam dijadikan simbol nasional yang menjadi lambang persatuannya.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912, organisasi ini didirikan Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang bertumpu untuk melaksanakan cita-cita agama sebagai aliran modernis Islam di Indonesia. Keadaan agama Islam di Indonesia sudah tidak utuh dan murni lagi karena pemeluknya terkungkung dalam kebiasaan yang menyimpang dari Al-Qur'an. Dorongan lain yang melahirkan organisasi modernis Islam itu ialah politik kolonial sendiri terhadap pengembangan agama Islam yang menginginkan agar agama Islam tetap tidak murni dan utuh. [54]

---

[53]Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*,…, hal. 123-124.

[54]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* …, hal. 44.

Muhammadiyah juga disebut sebagai gerakan *tajdid.* Perkataan *tajdid* bermakna pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi, dan sebagainya. Diantara tokoh modernis yang sedikit banyaknya telah meninggalkan beberapa karya keislaman di Indonesia. Mereka adalah Mohammad Natsir (1908-1993), Prof. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka 1908-1981), dan Prof. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy (1904-1975). Muhammadiyah dan SI mempunyai tujuan jangka panjang yang sama yaitu Islamisasi yang semakin mantap bagi masyarakat Indonesia.

Perbaikan pendidikan meliputi perbaikan dan pembentukan manusia Muslim yang berbudi, alim, luas pengetahuannya dan faham masalah ilmu keduniaan dan kemasyarakatan. Model sekolah Barat ditambah pelajaran agama yang dilakukan secara kelas akan dilakukan lebih banyak mendapatkan hasil dalam proses belajar mengajar. Bidang kemasyarakatan yang ditempuhnya ialah dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaga. [55]

3. Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan *(jam'iyyah diniyah Islamiyah)* yang didirikan oleh para ulama, pemegang teguh salah satu dari empat mazhab, berhaluan Ahlusunnah wal jama'ah, yang memiliki tujuan tidak hanya mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam tetapi juga

[55]Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*,…, hal. 90.

memperhatikan masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada ummat manusia.[56]

Nahdhatul Ulama (NU) lahir karena reaksi terhadap dua hal. *Pertama*, merupakan reaksi terhadap politisasi agama yang dilakukan oleh SI, dan *kedua*, merupakan reaksi terhadap gerakan pembaruan Muhammadiyah. Berbeda dengan SI dan Muhammadiyah, NU bertujuan untuk melestarikan lembaga-lembaga dan tradisi-tradisi Islam agraris dengan solidaritas mekanis komunalnya. Fokus NU adalah upaya-upaya yang lebih ultitarian dalam pengertian peribadatan semata. Itu sebabnya ia menolak kecendrungan SI yntuk mobilisasi politik. Karena karakteristik NU adalah paternalisme kiai yang berorientasi kuat pada mazhab, maka ia menolak gerakan Muhammadiyah yang antipaternalisme dan non mazhab. [57]

Pada dasarnya Nahdhatul Ulama (NU) tidak mencampuri urusan politik dan dalam kongresnya 1928 di Surabaya dengan keputusan untuk menentang reformasi kaum modernis dari perubahan-perubahan yang dilakukan Wahabi di Hijaz. Setelah 10 tahun berdiri NU menunjukkan kegiatan sendiri terutama dalam menghadapi desakan aliran Wahabi yang dianggap akan merapuhkan faham Ahlusunnah wal jam'ah. Karena terdesak kebutuhan untuk mengadakan persatuan Umat Islam maka pada tahun 1937 NU bergabung dalam MIAI.[58]

---

[56]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, …, hal. 50.

[57]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Mizan, Bandung, 1999), hal. 196.

[58]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*,…,Hal. 51.

Perbedaan yang lebih mendasar antara SI dan Muhammadiyah di satu pihak dengan NU di pihak lain adalah karena keduanya mempunyai basis sosial yang berbeda. NU tetap mewakili tradisi masyarakat komunal-agraris yang dijalin dalam ikatan-ikatan solidaritas mekanis-paternalistik. Di lain pihak SI dan Muhammadiyah muncul sebagai wadah yang mewakili tradisi baru masyarakat urban, pedagang, dengan ikatan-ikatan solidaritas organis-partisipatif.

Perbedaan-perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara Muhammadiyah dan NU juga dapat dilihat sebagai kontroversi antara kedua aliran modernis dan tradisionalis dalam Islam di Indonesia. Dengan munculnya partai-partai sekuler seperti PKI dan PNI yang sedikit atau banyak telah merebut massa SI.[59] Maka gerakan Islam pada dekade tahun 1930-an cenderung mengalami dinamika semata-mata atas dasar politik aliran yaitu aliran tradisionalis yang diwakili oleh NU dan aliran modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah.

4. Al-Irsyad dan Partai Arab Indonesia

Gerakan Islam modern juga dilakukan oleh keturunan Arab. Kelompok Sayid yang mengaku keturunan Nabi tetap mengelola Jamiat Khair, sedangkan kelompok yang bukan keturunan Sayid mendirikan perkumpulan Al-Irsyad pada tahun 1914. Organisasi ini menekankan persamaan antara umat manusia dan berlawanan dengan pendiri golongan Sayid.

[59]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi,* (Mizan, Bandung, 1999),hal. 198.

Keturunan Arab di Indonesia jumlahnya cukup banyak sehingga perlu diberi wadah dalam partai khusus mereka merasa lahir dari wanita Indonesia, karena itulah AR Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934.[60]

5. Aliran-aliran Islam Modern lainnya

Thawalib muncul di Sumatera Barat akibat dari keadaan yang sangat menyedihkan karena meluasnya pencemaran terhadap Islam. Organisasi ini bertujuan untuk mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kemajuan dunia dan akhirat menurut Islam. Kemudian organisasi ini berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia yang memperluas tujuannya ke bagian politik "Indonesia Merdeka dan Islam Jaya". Azas partai ini adalah Islam dan kebebasan yang kemudian dalam gerakan politik mencapai Indonesia Merdeka, orang-orang Sumatera Thawalib tampil sebagai ujung tombaknya di Sumatera Barat. Organisasi ini khususnya bergerak di bidang pendidikan dan politik dengan cepat meluas dengan politiknya yang radikal terpaksa menghentikan kegiatannya pada tahun 1936 karena terkena larangan pemerintah.[61]

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat. Organisasi ini bermazhab Syafii dan mematuhinya secara konsekuen. Kegiatan utamanya dalam bidang pendidikan adalah mendirikan madrasah, organisasi ini tidak tergabung dengan organisasi lain dan setelah

[60]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* …,hal. 46.

[61] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* …,hal. 47.

proklamasi kemerdekaan Indonesia berdiri sebagai partai politik dengan nama Parati Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Persatuan Muslim Tapanuli (PMT) merupakan organisasi yang didirikan oleh Syekh Musthafa Purbabaru dengan alasan yang sama dengan Perti, berupa penolakan terhadap pemakaian madzhab dalam Thawalib pada tahun 1930. Setelah kemerdekaan organisasi ini bergabung dengan Nahdlatul Ulama yang menebar di Sumatera Utara.

Persatuan Islam (Persis) berdirinya organisasi ini berdiri di bawah Kiai Hasan di Bandung merupakan akibat dari pembatasan gerak Jamiyatul Khair di Jakarta pada tahun 1923. Organisasi ini berusaha meningkatkan kesadaran beragama dan semangat ijtihad dengan mengadakan dakwah dan pembentukan kader melalui madrasah dan sekolahan.

Musyawaratut Thalibin merupakan organisasi yang berkembang di Kalimantan Selatan sebagai pewaris SI yang sudah dicurigai oleh pemerintah. Usaha SI di bidang pendidikan dilanjutkan dengan mendirikan madrasah Daru Salam.[62]

[62] Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* …,hal. 48.

BAB III

BIOGRAFI DELIAR NOER

A. Masa Kecil dan Pendidikan Deliar Noer

Deliar Noer adalah seorang tokoh intelektual, pemikir, peneliti dan pengamat politik Indonesia. Deliar Noer lahir di Medan pada tanggal 9 Februari 1926 bertepatan dengan 27 Rajab 1344 H, yaitu bertepatan dengan hari Mi'raj nabi Muhammad SAW.[1] Tahun kelahirannya disebut *tahun gempa*, akibat meletusnya gunung Merapi di Padang Panjang. Tahun kelahirannya disebut juga *tahun panas* bagi pergerakan Nasional. Orang-orang radikal (kalangan Islam maupun dari kalangan komunis) mempersiapkan dan akhirnya melancarkan pemberontakan.[2] Deliar Noer meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2008 (usia 82 tahun).[3]

Deliar Noer lahir dari orang tua yang berasal dari Parak Laweh Pakan Kamih Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Noer bin Joesof. Ayahnya bekerja di Kantor Pegadaian di Medan dan sekitarnya.[4] Deliar Noer adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya bernama Djuswar lahir di Padang tahun 1923 dan wafat tahun 2005. Rosma adalah adik perempuannya. Ia lahir bulan September dan sudah berpulang kehadirat Ilahi rabbi, bagian dari takdir Allah kepadanya, ia telah meninggal di masa kecilnya.[5]

---

[1]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deliar_Noer Diakses 30 Oktober 2109 pukul 08.15.

[2]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, (Jakarta: Mizan, 1996). hal 1.

[3]https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/14043340/deliar.noer.meninggal.dunia. Diakses 30 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

[4] Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*,…,hal.4.

[5]Jumal Ahmad, *"Biografi Prof. Dr. Deliar Noer",* dalam http:/www.biografi-deliar-noer.htm (24 November 2010)

Mulanya Ia di beri nama Muhammad Zubeir seperti yang ia dengar dari ibunya nama ini tegas bersifat laki-laki. Tetapi ketika menyandang nama ini ia sering sakit-sakitan paru-paru tidak kuat dan pernah beberapa waktu lamanya dadanya terus menerus di perban. Oleh sebab itu banyak yang menganjurkan untuk mengganti namanya menjadi Deliar Noer.

Masa kecil Deliar Noer dipanggil lebih akrab dengan nama Buyung di rumahnya begitu juga kawan-kawan ibunya terutama di Tebing mereka sering memanggilnya dengan nama Buyung. Tetapi setelah dewasa ia dipanggil dengan nama yang sebenarnya. Kecuali oleh orang tua dan saudara-saudaranya mereka tetap saja memanggil Buyung disingkat menjadi Yung. Di rumah keluarga Deliar Noer sering menggunakan bahasa Indonesia atau lebih banyak disebut bahasa Melayu. Ibu dan ayahnya di rumah berbahasa Minangkabau sedangkan anak-anaknya berbahasa Melayu.[6]

Pada tahun 1932 Deliar Noer dan keluarga pindah dari Pangkalan Susu ke Tebing Tinggi Deli, 82 km dari Medan ke arah Tenggara. Ayahnya menjadi pemimpin pajak gadai *(beheeder)* di Tebingtinggi. Mereka tinggal di rumah dinas di jalan Hoogstraat (di zaman Jepang bernama *Fuji Dori* dan di zaman merdeka Jalan Merdeka).[7]

Ayah Deliar Noer di tahun 1942 pernah ditangkap oleh Jepang karena memiliki rupa wajah yang mirip dengan orang Belanda. Tapi akhirnya ayah Deliar Noer membuktikan diri dengan memakai peci dan dengan membawa mushaf Al - Qur'an. Baru kemudian tentara Jepang itu percaya kepadanya bahwa ia penduduk

[6]https://ahmadbinhanbal.wordpress.com diakses 30 Oktober 2019 pukul 08.20 WIB

[7]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.37-38.

pribumi. Ayah Deliar Noer bukan simpatisan dengan tokoh pergerakan nasional Soekarno, terbukti kontradiktif kedudukan ayahnya sebagai pegawai negeri masa kolonial. Ayah Deliar Noer meninggal tahun 1945 ketika ia di Jakarta zaman revolusi korban keganasan di kota Tebingtinggi oleh Jepang pada Desember.[8]

B. Pendidikan Deliar Noer

Deliar Noer memulai pendidikannya di sekolah Desa di Pangkalan susu, Medan. Saat itu ia duduk di kelas yang sama dengan kakaknya di kelas satu. Sebenarnya kakaknya sudah bisa bersekolah lebih dahulu karena beda umur mereka adalah 2 ½ tahun. Kakaknya memang lambat masuk sekolah karena tangan kanannya ketika disuruh kepala sekolah menggapai telinga kirinya dari atas kepala tidak sampai memegang daun telinga kirinya itu.

Mulanya Deliar Noer bersekolah seenaknya saja, adakalanya ia pulang padahal sekolah belum usai. Saat belum waktunya jam pulang ia pulang begitu saja tetapi lambat laun ia mulai terbiasa dengan jam sekolah. Boleh dikatakan ia senang bersekolah ditempat itu. Tetapi ayahnya dipindahkan ke Tebingtinggi sehingga ia dan kakaknya tidak sampai kelas dua di sekolah Desa.[9]

Pada tahun 1932 di Tebingtinggi Deliar Noer melanjutkan sekolahnya di HIS Taman Siswa. Tahun berikutnya 1933 setelah kelas dua ia pindah ke HIS negeri atau milik pemerintah hingga ia tamat di sekolah ini pada tahun 1939. Waktu itu hanya anak-anak pejabat pemerintah saja yang dapat bersekolah di HIS itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS Deliar Noer dan kakaknya

[8]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.245-248.

[9]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.20-21.

meneruskan sekolah ke MULO Medan, sekolah menengah pertama di zaman Belanda yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar juga kepunyaan pemerintah termasuk bergengsi dan biasanya hanya terdapat satu atau dua buah saja di provinsi atau keresidenan. Di MULO kakak beradik ini tinggal mengontrak di rumah teman ibunya. Kakaknya hanya satu tahun di MULO karena ketika kakaknya naik kelas 1 (satu) ia diterima di sekolah Teknik Menengah di Semarang. Sebelumnya kedua kakak beradik itu singgah di Jakarta dan tinggal di rumah pak Alamsuddin tokoh Murba pada awal orde baru pernah menjadi Walikota Jakarta Timur.[10]

Di MULO kelas 2 kegiatan olahraganya mulai meningkat tercermin pada tubuh Deliar Noer yang mulai kekar dan tinggi. Pelajaran lain yang menarik perhatiannya adalah pelajaran agama Islam yang ia dapat dari gurunya yang berasal dari Minangkabau yang dari masa kecilnya sudah di Sumatera Timur ia adalah H. Bustami Ibrahim dalam seminggu sekali. Adapun pelajarannya: tentang iman, akhlak, makna ibadah, pemikiran tentang manusia, alam dan tuhan, serta tentang pembagian makhluk Allah: yang bernafsu saja, yang berakal saja, dan yang bernafsu dan berakal serta yang tidak bernafsu dan tidak berakal. Mulai dari kelas satu Deliar Noer turut dalam Persatuan Pemuda Islam (PPI). PPI ini tidak banyak kegiatannya, tetapi pertemuan-pertemuan dengan organisasi pemuda-pemuda lain seperti dengan Pemuda Muhammadiyah kepanduan Surya Wirawan sering diadakan.[11]

---

[10]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.94-99

[11]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.126-127.

Pada tanggal 8 Desember 1941 Radio dan Koran mengumumkan berita serangan Jepang terhadap Teluk Mutiara Hawaii, yang kemudian pecahlah perang Pasifik. Semua murid-murid MULO di kumpulkan oleh direktur dan menjelaskan perkembangan di Asia yaitu serangan Jepang di Teluk Mutiara Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jepang dan Hindia Belanda pun menyatakan diri kepada Jepang. Berhubung dengan hal ini guru-guru kecuali Meneer Mangatas dan Meneer Vonk dipanggil untuk menjalani wajib militer. Guru-guru baru pun bermunculan beberapa hari kemudian sebagian mereka adalah Pastoor gereja Katolik, sebagian dari guru-guru *Christelijke* MULO sekolah Swasta Kristen. Tanggapan Deliar tentang pengajar barunya tidak memiliki kesan yang bagus. Akhirnya waktu liburan Desember Deliar pulang ke Tebingtinggi.[12]

Kehidupan di Tebingtinggi sudah lama juga berubah semenjak penyerangan Jerman ke negeri Belanda tahun 1940. Keluarga ini memutuskan untuk sebaiknya mengungsi ke Bukittinggi dan ayah Deliar Noer akan tetap tinggal di Tebingtinggi karena ia tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Deliar Noer melanjutkan sekolah MULO di Bukittinggi MULO di Bukittinggi dengan semua pengajar adalah wanita Belanda, tidak lama berjalan akhirnya sekolah itu bubar di bulan Februari karena kurang professional dalam pengajaran.[13]

Pertengahan tahun 1943 Deliar Noer kembali ke Medan untuk melanjutkan sekolah menengah umum tingkat pertama *(Tygakko)*. Deliar Noer

[12]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.128.

[13]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.135.

juga mendapatkan pelajaran latihan kemiliteran terutama baris berbaris dengan pelatih orang Jepang dari Seinen. Deliar Noer sering membaca buku sejarah Barat lewat buku pinjaman guru Matematikanya Melanthon Siregar. Ketika duduk di kelas tiga *Tyugakko* seluruh wakil-wakil sekolah menengah termasuk sekolah menengah Melati dan sekolah kepandaian Puteri mengadakan rapat bersama untuk membentuk organisasi murid semua sekolah menengah. Pada rapat pembentukannya juga hadir para direktur sekolah. Beberapa dari murid kelas tiga yang juga senior di tiap sekolah mengamati bahwa pembentukan perkumpulan seperti itu bisa saja dikaitkan dengan kebijaksanaan yang tidak serasi dari sudut pemerintah. Rapat menyetujui pembentukan perkumpulan dan sekaligus memilih pengurus. Dliar Noer terpilih sebagai ketua, Arifin dan Kogyo sebagai sekretaris merangkap bendahara. Tetapi kegiatan perkumpulan ini tidak menonjol tidak ada program yang jelas dan forum rapat masih merupakan tempat pertukaran informasi tentang keadaan sekolah masing-masing.

Di kelasnya Deliar Noer terpilih menjadi murid *kohisei*, murid yang mendapat beasiswa dari pemerintah. Deliar Noer minta pendapat para pejabat di Medan tentang kelanjutan pendidikannya di antaranya Amir Hasan dan Dr. Pirngadi. Selama itu Deliar Noer mendapatkan *kohisei* (beasiswa) dari pemerintahan Jepang yang sebelumnya meminta pendapat tentang beasiswa tadi apakah boleh atau tidak kepada Bustami dan Amir Hamzah guru bahasa Jepang

yang termasuk aktif di *Jong Islamieten Bond*. Akhirnya Deliar Noer memutuskan ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya.[14]

Pada tanggal 20 April 1945 Deliar Noer mulai sekolah di SMT (Sekolah Menengah Tinggi).[15] Semenjak bulan puasa di mulai yaitu bulan Agustus. Pada bulan ini memang sekolah libur tetapi karena perkembangan yang berkaitan dengan akibat dan kelanjutan proklamasi kemerdekaan sekolah terus tutup. Kemudian Januari 1946 baru sekolah dibuka, ketika itu Deliar Noer bekerja di Kementrian penerangan. Tidak sampai satu bulan bekerja di Kementrian Penerangan karena SMT di buka kembali dengan nama SMA dan Deliar Noer mendaftarkan diri kembali.[16]

Setelah aksi militer pertama Belanda (21 Juli 1947) sekolah mulai tidak teratur. Sekolah-sekolah RI umumnya ditutup walau untuk SMA pelajaran dilanjutkan dengan berkumpul dari rumah ke rumah. Pada malam 21 Juli 1947 mereka seasrama ditangkap Belanda (NICA) dan di tahan di gedung sekolah selama satu malam. Ada dua perjuangan yang Deliar Noer hadapi di Jakarta, *pertama* yang bersangkutan dengan kemerdekaan negar Indonesia dan *kedua* perjuangan hidupnya. Setelah pindah ke Pegangsaan Barat ia turut mendaftar pada BKR (Badan Keamanan Rakyat).[17]

---

[14]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.179.

[15]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.221.

[16]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.226-227.

[17]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.241.

Setelah lulus Deliar Noer melanjutkan studinya di Singapura. Perjalanan ke negeri Singapura menggunakan kapal Malioboro. Di Singapura ia bekerja sebagai staf perwakilan RI ia mulai melanjutkan studinya di samping bekerja di *Trade Departement* bagian perdagangan perwakilan RI. Deliar Noer juga mengambil *less privat* bahasa Inggris mulanya dengan seorang Cina lulusan Inggris yang mempunyai gelar B.A dan LL.B. Di sini keahlian administrasi terasah. Deliar Noer di bagian tulis menulis surat, laporan, pemikiran dan ketentuan yang akan dijadikan peraturan dalam rangka hubungan dagang antara daerah republik yang masih tersisa di Sumatera dan Jawa.[18] Setelah perkara itu dirapatkan bersama penyusunannya diserahkan kepada Deliar Noer. Karena studi di Singapura tidak membuahkan hasil perjuangan di sana tidak terwujudkan kemudian ia memutuskan kembali ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di sana.[19]

Di Jakarta Deliar Noer masuk Akademi Nasional jurusan Sosial Ekonomi Politik pada tahun 1950.[20] Lembaga pendidikan ini didirikan 1 Oktober 1949 untuk menampung keinginan para calon mahasiswa yang masih setia pada RI. Karena perguruan tinggi seperti universitas tidak dibolehkan oleh pemerintah pendudukan Belanda untuk didirikan oleh swasta, beberapa tokoh RI bidang pendidikan dengan pemimpin Sutan Takdir Alisjahbana mendirikan Akademi Nasional. Pada tahun 1950 akademi itu kemudian diubah menjadi Universitas Nasional.

---

[18]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.264.

[19]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.291.

[20]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.302.

Deliar Noer tertarik menggabungkan diri dalam HMI karena ia merasa sebagai orang Islam yang berkewajiban untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam itu pada setiap kesempatan. Dalam kongres HMI yang diadakan di Jakarta pada September 1953, ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1953-1955. Karena Deliar Noer menjadi Ketua Umum PB HMI maka secara otomatis juga mengemban tugas menjadi Ketua Umum PPMI (Perhimpunan Persyerikatan Mahasiswa Indonesia) seluruh Indonesia.[21]

Menjadi ketua Umum PB HMI dan Ketua Umum PPMI (Perhimpunan mahasiswa ekstra universitas) semakin mengentalkan hubungannya dengan beberapa tokoh berpengaruh seperti Mohammad Natsir dan Mr. Mohammad Roem. Melalui jasa baik Natsir lah ia diperkenalkan dengan Profesor George McT. Turnan Kahin guru besar Universitas Cornell, Amerika Serikat. Oleh sang Profesor ia ditawari untuk meneruskan pendidikan Pasca Sarjana di *Cornell University*.

Deliar Noer berkesempatan untuk meraih gelar *Master Of Art* (MA) dan sekaligus program doktor (Ph.D) di bidang ilmu politik. Gelar B.A *(Bachelor Of Art)* yang diperolehnya dari Akademi Nasional (1958) itu di luar negeri dihargai sama dengan Sarjana starata S1 di Indonesia. Di Cornell itulah ia menyelesaikan gelar MA (1960) ia mendaftar lagi Program Ph.D untuk ilmu politik. Sebagai calon Ph.D ia merasa kajiannya semakin bertambah dengan teori politik termasuk perbandingan politik fokus Asia Tenggara sebagai bagian dari Studi Timur jauh. Tahun 1961 ia berhasil menyelesaikan program Ph.D. Dengan berhasilnya ia

[21]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Asal Minang Kabau di Pentas Nasional,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.109.

menggondol ijazah program Ph.D dalam Ilmu Politik pada waktu itu. Dalam mengambil gelar itu ia menyusun tesis yang berjudul: *"The Modernist Moslem Movement in Indonesia 1900-1942".* Maka Deliar Noer disebut sebagai doktor ilmu politik Cornell pertama yang dihasilkan Indonesia.[22]

C. Karir Dan Karya Deliar Noer

Deliar Noer mengawali kariernya sebagai penyiar RRI pada tahun 1947. Pekerjaan ini dilakoninya untuk membiayai pendidikannya kemudian di Singapura menjadi staf perwakilan Departemen Perdagangan RI. Ia pernah menjadi wartawan koran "Berita Indonesia" dan majalah bulanan "Nusantara".[23] Tahun 1950 ia ditunjuk menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta. Tiga tahun kemudian ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar HMI.[24]

Sepulang dari Amerika Serikat Deliar Noer mengajar di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Saat itu mengajar merupakan profesi yang cukup berbahaya dan riskan karena para mahasiswa yang dihadapi banyak yang sudah termakan dengan ideologi komunis CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan semi komunis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Yang tergabung dalam GMNI ini memang semula mereka bukanlah mahasiswa komunis seperti CGMI tetapi pada waktu itu mereka mulai dominir oleh CGMI

---

[22]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Asal Minang Kabau di Pentas Nasional,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.110.

[23]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer,* …,hal.226.

[24]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer,* …,hal.335.

karena organisasi mereka (GMNI) mungkin sudah disusupi oleh mahasiswa komunis.

Deliar Noer seorang dosen yang bertempramen lembut maka pada suatu waktu mahasiswa komunis ini melaporkan Deliar Noer kepada pimpinan universitas yang menuduhnya sebagai antek-antek Partai Masyumi dan Anti Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang waktu itu diwakili oleh PNI, PKI, dan NU. Maka pimpinan Fakultas juga tidak mau menerima risiko yang lebih besar memberhentikan dan melarang Deliar Noer mengajar di USU dan melaporkan Deliar Noer kepada Menteri PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) yang waktu itu dijabat oleh Dr. Syarif Thayeb.[25]

Deliar Noer dilarang mengajar di Universitas Sumatera Utara dan yang melarangnya adalah Prof. Dr. Sjarif Thayeb juga ketika itu menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dia dipecat dari USU karena desakan golongan kiri yang menuduhnya antek Amerika dan dekat dengan Bung Hatta yang ketika itu sudah berhenti sebagai Wakil Presiden Soekarno sehingga Deliar Noer dituduh subversive dan anti Manipol.

Deliar Noer pernah menjadi Rektor IKIP Jakarta selama 7 tahun tapi dipecat ketika hendak membacakan pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada bulan Juni 1974 padahal masa jabatannya yang kedua (terakhir) hanya tinggal beberapa bulan lagi. Isi pidato pengukuhannya dianggap oleh Menteri P dan K Mayjen Prof. Dr. Sjarif Thayeb sebagai menghasut mungkin karena takut terjadi kerusuhan seperti Malari yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya.

[25]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, …,hal.606.

Keterangan Deliar Noer bahwa pidato yang berjudul "Partisipasi dalam Pembangunan" itu disusun secara ilmiah sesuai dengan kebebasan mimbar otonomi perguruan tinggi, tidak digubris oleh Menteri. Sebelumnya tidak lama setelah peristiwa Malari, Deliar Noer sempat mengemukakan pendapat yang berbeda dengan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam menghadapi gerakan mahasiswa dimuat dalam *Harian Kami.*[26]

Di pecat dari IKIP sebenarnya lebih dari itu karena menteri juga melaranganya mengajar diseluruh Indonesia karena dianggap menghasut para mahasiswa dan karena itu sempat diintrogasi yang menangani Gestapu artinya Deliar Noer dituduh sebagai orang kiri. Padahal Deliar pernah menjadi ketua HMI yang niscaya anti komunis-hal yang jelas Nampak dalam tulisan-tulisannya. Begitulah nasib ilmuwan (sosial) politik yang berani secara jujur mengemukakan pandangannya secara ilmiah tanpa mempedulikan arah kebijakan politik pemerintah yang berkuasa.

Karena tidak boleh lagi mengejar diseluruh Indonesia baik di universitas swasta maupun di universitas negeri Deliar Noer menerima tawaran untuk menjadi peneliti di ANU *(Australia National University)* Canberra.[27] Setelah berada di Australia dia juga mendapat tawaran untuk mengajar di Kuala Lumpur di Universitas Kebangsaan Malaysia dan tawaran dari *The Ford Foundation* untuk membimbing penyusunan tesis para sarjana IAIN yang mendapat beasiswa belajar di Leiden negeri Belanda. Tapi pemerintah RI menutup kemungkinan itu dengan menghubungi IAIN dan pemerintah Singapura. Tahun petama Deliar Noer

[26]Ajip Rasidi, *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari*,(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2010),, …,hal.183.

[27]Ajip Rasidi, *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari*, …,hal.184.

menjadi peneliti di ANU. Tahun berikutnya menjadi tenaga pengajar tamu di Griffth University di Brisbane. Setelah setahun kedudukan itu berubah menjadi pengajar tetap.[28]

Setelah mengajar lima tahun Deliar Noer bisa mempertemukan maksud beberapa orang kawannya sesama ilmuwan yang Islami di Jakarta yang ada di lingkungan M. Natsir untuk membentuk lembaga riset LIPPM (Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat). Bekerja sama dengan *Griffith University* Deliar Noer yang dipercaya untuk memimpin lembaga tersebut selama tiga tahun pertama masih bekerja di *Griffith University* tetapi enam bulan dalam setahun dia diperbolehkan bekerja di Jakarta untuk LIPPM. Ketika berada di Brisbane, melalui surat Deliar diminta oleh Mr. Moh. Roem yang menjadi salah seorang anggota Dewan Penyantun LIPPM agar jangan kembali ke Jakarta tanpa alasan yang jelas. Deliar Noer berpendapat bahwa sebagai lembaga riset LIPPM seharusnya mempunyai kebebasan dan tidak diharuskan menyesuaikan hasil penelitiannya dengan keinginan pihak yang mendalami LIPPM. Pendapat itu tidak disetujui oleh pihak yang memberinya dana. Setelah ditinggalkan oleh Deliar Noer LIPPM perlahan-lahan sirna dari permukaan bumi.[29]

Deliar Noer bukan hanya ilmuwan ia juga aktivis. Pada awal masa Orde Baru Deliar Noer pernah menjadi staf penasehat Presiden Soeharto tapi kemudian mengundurkan diri karena berbeda faham dengan staf yang lain.[30]

---

[28]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer,* …,hal.713.

[29]Ajip Rasidi, *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari,* …,hal.185.

[30]Ajip Rasidi, *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari,* …,hal 187

Menjabat di Rektor IKIP Jakarta ia juga diminta oleh Bung Hatta untuk mempersiapkan kelahiran PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) pada tahun 1968. Kehadiran partai ini memiliki maksud untuk menampung aspirasi masyarakat Islam yang belum mempunyai wadah partai untuk menyalurkan keinginan politiknya. PDII diproses oleh Bung Hatta dan Deliar Noer sebagai salah seorang yang berperan penting untuk kelahirannya. Pemrakarsa PDII ini juga melibatkan unsur-unsur Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), NU, Al-Djaamiatul Wasliyah, Al-Irsyad, PDTI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) yang di pimpin oleh Jederal Soedirman. Di samping itu juga didukung oleh GPII, PII, Gasbindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia). Para organisasi pendukung ini tergabung dalam Badan Amal Muslimin. Ternyata kelahiran PDII tidak mendapat izin dari Pemerintahan Orde Baru.[31]

Tumbangnya kekuasaan Soeharto sebagai Presiden pada akhir Mei 1998 maka terbukalah keran reformasi. Deliar Noer yang selama ini terkenal sebagai ilmuwan politik juga tidak ketinggalan mendirikan sebuah partai baru yang dinamainya dengan Partai Umat Islam (PUI). Kemudian ketika daftar partai pengikut Pemilu 1999 diumumkan oleh Tim 11 termasuk nomor urutnyam maka PUI termasuk partai yang lolos verifikasi. Melihat calon-calon yang diusungnya adalah orang-orang terkenal dan bersuara lantang selama ini terhadap pemerintahan Soeharto seperti Harun Al Rasidi, mochtar Naim dan Mursalin Dahlan. Dalam KPU Pemilu 1999 itu PUI diwakili oleh Prof. Dr. Harun Al

[31]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Asal Minang Kabau di Pentas Nasional*, …,hal.111

Rasyid. Seuasai penghitungan suara yang ditandatangai oleh Presiden Habibie ternyata PUI gagal mendapat suara untuk kursi DPR, dan DPRD.[32]

Deliar Noer berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki gelar doktor (Ph.D) dalam ilmu politik dengan disertasi *The Modernist Muslim in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1972) yang sekarang telah menjadi klasik. Deliar Noer sudah menyusun buku yang berjudul "Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa" yang ketebalannya belum ada tandingan di antara buku-buku yang pernah diterbitkan, Di samping itu Deliar Noer banyak menulis buku tentang Islam dan Politik di Indonesia, di antaranya *Partisipasi dalam Pembangunan* (Kuala Lumpur, ABIM, 1975), *Administrasi of Islam in Indonesia* (Ithaca, Modern Indonesia Project, 1982), *Ideologi, politik dan Pembangunan* (Jakarta, Yayasan Perkhidmatan, 1980), *Mohammat Hatta: Biografi Politik* (Jakarta, LP3ES, 1990), *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa, Otobiografi* (Bandung, Mizan, 1996), *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Edisi revisi, Bandung, Mizan, 1997), *Partai Islam di Pentas Nasional* (edisi revisi, Bandung, Mizan, 2000), *Membincang Tokoh-tokoh Bangsa* (Bandung, Mizan, 2001), *Islam dan Masyarakat* (Jakarta, Yayasan risalah, 2003), *Islam dan Politik* (Jakarta, Yayasan Risalah, 2003), *KNIP* (Jakarta, Yayasan Risalah, 2005), dan lain-lain.[33]

[32]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Asal Minang Kabau di Pentas Nasional*, …,hal. 112.
[33]Ajip Rasidi, *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari*, …,hal. 186.

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK DELIAR NOER DALAM KONTEKS POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Deliar Noer dalam Kancah Politik Islam Indonesia

Permulaan tahun 1967 Deliar Noer dilantik menjadi Rektor IKIP Jakarta oleh Menteri P & K Mashuri jabatan rektor ini disandangnya mulai Februari 1967 sampai Agustus 1974. Ketika ia sedang menjabat Rektor IKIP Jakarta Deliar Noer diminta oleh Bung Hatta untuk mempersiapkan kelahiran PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) pada tahun 1968. Kehadiran Partai ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Islam yang belum mempunyai wadah partai untuk menyalurkan keinginan politiknya. Bung Hatta dan Deliar Noer sebagai salah seorang yang berperan penting untuk kelahirannya di antara pemrakarsa yang melibatkan unsur-unsur Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), NU, Al-Djamiatul Wasliyah, Al-Irsyad, PDTI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam), yang dipimpin oleh Jendral Soedirman. Selain itu juga didukung oleh GPII, PII, Gasbindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia). Organisasi-organisasi pendukung ini tergabung dalam Badan Amal Muslimin dan kelahiran PDII ternyata tidak mendapat izin Presiden Soeharto.[1]

Pada era reformasi Deliar Noer membentuk suatu partai yaitu Partai Umat Islam (PUI) sekaligus menjadi ketua Umum dari partai tersebut.[2] Era reformasi Deliar Noer juga mempunyai kedekatan hubungan dengan beberapa tokoh-tokoh

[1]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Indonesia Asal Minangkabau di Pentas* Nasional, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 111.

[2] Deliar Noer, *80 Tahun Deliar Noer,* (Jakarta: Hilal Publishing House, 2007), hal. 289.

nasional Indonesia seperti Bj. Habibie. Dalam pertemuan itu Habibie menyatakan bahwa dalam menghadapi cobaan yang menimpa bangsa Indonesia yang diperlukan adalah rasa tulus ikhlas, apalagi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuatu yang sangat diingat Deliar Noer dalam sebuah negara harus diperlukan suatu agama yang menjadi bimbingan dalam hidup bernegara kemudian negara hendaknya mendekatkan masyarakatnya dengan agama serta moral.[3]

Masalah kepemimpinan dalam suatu negara demokrasi pada umumnya tidak terlepas dari persoalan mengenai partai. Partai adalah suatu tempat berkumpul orang-orang yang se-cita-cita, se-ideologi.[4] Deliar Noer sebagai mantan Rektor IKIP dan sebagai pemimpin Partai Umat Islam (PUI) Jakarta, ia ingin eksistensinya menjadi rahmat bagi semua insan. Partai tersebut di deklarasikan di Mesjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 1998 yang merupakan partai pertama berazas Islam yang didirikan sesudah rezim Soeharto tumbang. Di samping itu, Deliar Noer juga berkeinginan membangun bangsa Indonesia yang memiliki citra bangsa yang berdaulat. Bagi Deliar Noer misi utama partai PUI adalah mewujudkan Islam dalam kehidupan nyata sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Partai PUI termasuk partai yang lolos verifikasi ketika daftar partai pengikut pemilu 1999 diumumkan oleh tim dan memiliki nomor urut 11. Melihat calon-calon yang di usungnya adalah orang-orang terkenal dan bersuara lantang selama ini terhadap Pemerintah Soeharto seperti Harun Al Rasyid, Mochtar Naim

[3]Deliar Noer, *80 Tahun Deliar Noer,*…, hal. 363.

[4]Ismanizar: *Jurnal Kepemimpinan negara menurut pandangan Deliar Noer,* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), *Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 226-244*

dan Mursalin Dahlan. Dalam KPU pemilu 1999 itu PUI diwakili oleh Prof. Dr. Harun Al Rasyid. Beliau duduk sebagai wakil ketua KPU kemudian mengundurkan diri setelah intern KPU yang dipimpin mantan mendagri Rudini itu tidak mencerminkan asas demokrasi yang di dambakan.[5]

Seusai pemilu dan perhitungan suara di tandatangani oleh Presiden Habibie ternyata PUI gagal mendapat suara untuk kursi DPR dan DPRD. Mengenai kegagalan PUI dalam Pemilu ini Dr. Mochtar Naim yang waktu itu merupakan calon anggota DPR mewakili PUI berkomentar bahwa Deliar Noer kurang memiliki kepiawaian memainkan dan mengendalikan emosi massa.[6]

Kegagalan PUI dalam pemilihan umum tahun 1999 membuatnya harus lahir menjadi partai baru pada pemilihan umum tahun 2004. PUI mengubah nama menjadi Partai Ummat Islam Indonesia (PUII), maka berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru yang disahkan oleh notaris dan diverifikasi oleh Departemen Kehakiman dan hak-hak asasi manusia yang menjadi ketua Partai ini adalah Deliar Noer.

Deliar Noer pernah diajak oleh pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membantu mereka. *Pertama*, ketika menghadapi rancangan undang-undang tentang pokok pendidikan nasional. Kalangan Islam pada umumnya tidak menyetujui konsep yang diajukan pemerintah yang bukan saja tidak menyebut madrasah dan pesantren melainkan juga bagai menjauhkan pendidikan formal kita pada agama. Yang terutama diinginkan oleh pimpinan PPP

---

[5]Gouzali Saydam, *55 Tokoh Indonesia Asal Minang kabau di Pentas Nasional*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 112.

[6]Gouzhali Saydam, *55 Tokoh Indonesia Asal Minangkabau di Pentas Nasional*, …,hal. 112.

ialah mendengarkan pendapat Deliar Noer tentang otonomi perguruan tinggi. *Kedua,* Deliar Noer diminta oleh DPP PPP untuk bersama Ismail Hasan Metareum dan Mardinsyah (ketika itu ketua adalah J.H. Naro) menghadiri konferensi di Banda Aceh tahun 1990 Deliar Noer bersedia pergi dan turut menghadiri konperensi tersebut serta juga memberikan ceramah dalam rangka seminar atau simposium mereka sebelum konperensi dimulai. [7]

Deliar Noer juga pernah terlibat dalam rangka kegiatan Petisi 50 dan FPKR (Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat) yang didirikan pada tahun 1991. Deliar Noer tidak turut dalam penandatanganan petisi ini karena tahun 1980 ia berada di Australia. Oleh sebab itu ia hanya mendengar tentang Petisi 50. Sebagian dari orang-orang yang menandatangani petisi tersebut termasuk kalangan Islam, ada yang dari Masyumi, PNI lama, dan ada dari kalangan lain, yang mengherankan ialah bahwa berbagai perwira tinggi tentara turut dalam petisi ini. Hatta dan Jenderal Nasution juga tidak ketinggalan. Mereka umumnya adalah orang-orang yang lurus, jujur, disegani. Sebagai kelanjutan dari pemikiran ini pertemuan-pertemuan berikutnya membahas persiapan kearah gerakan yang merakyat. Untuk itu diperlukan rumusan tentang aspirasi yang hendak diwujudkan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penyusunan rumusan ini ditugaskan kepada Deliar Noer dengan perbaikan, tambahan, pengurangan dari peserta yang bukan terbatas pada kelompok kerja Petisi 50, rumusan ini diresmikan dan disiarkan tanggal 22 Agustus 1991 dengan itu lahirlah Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FKPR). Diantara anggota Petisi 50 yang aktif

[7]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*, (Jakarta: Mizan, 1996), hal. 902.

dalam perumusan itu ialah Slamet Bratanata, mantan menteri zaman akhir Soekarno seperti Natsir, Boerhanoedin Harahap, atau Sjafruddin. Forum FPKR ini dipimpin oleh tiga orang: H.R. Dharsono, Deliar Noer, dan Abdul Madjid. [8]

B. Politik Islam di Indonesia dalam Pemikiran Deliar Noer

Deliar Noer merupakan seorang ilmuan yang cerdas kapasitas keilmuannya diakui di tingkat nasional dan internasional. Di dalam negeri Deliar Noer dikenal mempunyai kedekatan dengan M. Hatta, M. Natsir, Sjahrir, Soekarno bahkan juga Soeharto dan ratusan tokoh bangsa lainnya. Mengenai kehidupannya di luar negeri selain kapasitas keilmuannya Deliar Noer juga dikenal sebagai ilmuwan yang hidup dalam kenyataan "kekinian dan kedisinian" sambil cita-citanya tertera jauh ke depan. Deliar Noer tidak hanya membahas fenomena dengan teori dan analisa tetapi Deliar Noer mau turun tangan ikut bekerja, berbenah, menceburkan diri dalam lumpur perjuangan perbaikan nasib bangsa. [9]

Sebuah persoalan yang perlu dicatat di sini yaitu masalah agama dan negara sebenarnya adalah masalah yang pada mulanya timbul dalam perkembangan sejarah politik dunia Barat. Sampai pada masa abad pertengahan Eropa senantiasa mengenal perpaduan gereja dengan negara persatuan itu pecah ketika terbit pengakuan dari pihak gereja sendiri seperti yang dikemukakan oleh Paus Gelasius di abad ke-5 bahwa raja (kepala negara) dan paus (kepala gereja) masing-masing mempunyai bidang kekuasaan yang berbeda-beda dan terpisah,

[8]Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer*,…, hal. 959-963.

[9]https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2018/02/135204/belajar-dari-deliar-noer 1.html Diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

yang pertama mengenai bidang duniawiah, yang kedua mengenai bidang rohaniah. Doktrin ini terkenal dengan "doktrin dua pedang atau dua kekuasaan" dari Gelasius tetapi praktek memperlihatkan bahwa menjalankan doktrin ini tidaklah semudah menetapkan dan merumuskannya. Pemisahan gereja dan negara seperti yang berlaku di Barat banyak memberikan pengaruh pada pemimpin-pemimpin kemerdekaan di Asia umumnya termasuk Indonesia dengan catatan bahwa apa yang disebut gereja disamakan dengan agama. Di Indonesia persoalan ini mulai muncul pada abad 20-an usaha mencapai kemerdekaan telah memperlihatkan perbedaan-perbedaan pendapat tentang kedudukan agama dalam negara (yang hendak dibentuk bila kemerdekaan itu tercapai).[10]

Masalah agama dengan negara mulanya timbul sebagai lanjutan peristiwa *Jawi Hisworo,* komite untuk Kebangsaan Jawa *(comite voor het javaansche nationalisme)* yang didirikan dalam rangka peristiwa ini mengecam kalangan Sarekat Islam dengan menandaskan bahwa "politik dan agama haruslah dipisahkan". Pendapat ini ditolak oleh kalangan Sarekat Islam (SI) dengan mengatakan antara lain bahwa gerakan mereka adalah "Islam nasionalis". Perbedaan dan pertentangan pendapat mengenai masalah hubungan agama dengan negara kemudian dilanjutkan oleh kalangan komunis yang mulai berkukuh disatu pihak dengan kalangan Islam (terutama SI). Pertentangan antara peserta SI dengan mereka yang ingin mengesampingkan ajaran Islam berlanjut di tahun 1921 ketika PKI (Perserikatan Komunis India = Indonesia) dikenakan disiplin oleh SI, maksudnya tiap anggota SI tidak boleh menjadi anggota PKI dan apabila ia tetap

[10]Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik,* Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 185.

juga duduk dalam PKI ia akan kehilangan ke anggotaannya pada partai Islam. Polemik antara kalangan Islam disatu pihak dengan kalangan nasionalis dipihak lain tentang bangsa, kebangsaan dan tanah air, dapat juga dilihat sebagai perbedaan tempat berpijak masing-masing dalam hubungan masalah yang di bicarakan. [11]

Menurut Deliar Noer sebenarnya tidak perlu masalah agama dan negara itu timbul dalam alam Indonesia. Islam tidak mengenal susunan hierarki pejabat seperti yang dijumpai pada gereja dengan sistem kependetaannya. Jadi, dalam Islam tidak dikenal masalah "gereja" tidak ada kepala agama. Deliar Noer juga berpendapat bahwa dalam perkembangan di negeri-negeri Barat yang dipisah dari negara pun adalah gereja bukan agama. Bagi negara yang penduduknya menganut agama Islam tidak ada lembaga "gereja" yang perlu dipisahkan dari kehidupan bernegara. Di pandang dari sudut ini maka polemik antara Soekarno dan Mochlis (Natsir) seakan memproyeksikan perkembangan suatu agama yang mengenal hierarki (gereja) dalam alam Indonesia yang tidak mengenal lembaga gereja seperti itu.[12]

Menurut Deliar Noer negara adalah semacam bentuk ikatan antar manusia semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat mempergunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan ini pada umumnya ada dua macam *pertama,* yang meliputi keseluruhan segi hidup manusia dan *kedua,* yang meliputi hanya sebagian dari segi-segi hidup itu. Dalam sejarah bernegara maka kedua macam ikatan itu ada terdapat yang satu lebih tampak daripada yang lain. Dalam

[11]Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran* Politik, Edisi baru,…, hal. 186-187.
[12]Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran* Politik, Edisi Baru,…, hal. 206.

negara dimana kekuasaan itu bersifat mutlak dan bulat pada pihak penguasa maka mungkin sekali terjadi bahwa segala segi hidup rakyat bersangkutan termasuk segi rohaniah yang dikuasainya. Sebaliknya dalam negara yang tidak membulatkan kekuasaan pada tangan penguasa melainkan yang memberikan kebebasan pada warganya maka hanya beberapa segi kehidupan sosial dari warga tersebut yang di kuasai oleh negara. Kekuasaan negara dalam hal yang akhir ini tidak menyeluruh melainkan terbatas dan batas-batasnya pun ditentukan bersama pula ikatan bernegara pun dengan sendirinya tidak bersifat menyeluruh. [13]

Deliar Noer menyebutkan bahwa politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan memiliki maksud untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Menurut Deliar Noer berbicara tentang Islam termasuk perpolitikan Islam di dalamnya berbagai hal perlu dijadikan pertimbangan dan rujukan yang berkaitan dengan sifat pandangan hidup Islam, termasuk dalam soal politik. Sebagai agama yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, maka Islam di samping mengajarkan tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat (serta negara) menganjurkan tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem, secara umum. Cara dan sistem disertai nila-nilai tersebut banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bagi orang Islam harus dijadikan contoh. [14]

---

[13]Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran* Politik, Edisi baru,…, hal. 62.

[14]Abdurrahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di* Indonesia, (Bandung: Pustakan Hidayah, 1999), hal. 112.

Dengan demikian nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, amanah, tanggungjawab, satu kata dengan perbuatan, sikap istiqamah (konsisten), dan sebagainya perlu tegak. Ini menuntut pengaturan (sistem) kehidupan masyarakat (dan negara) yang juga sesuai dengan nilai-nilai. Umpamanya saja semua nilai dapat terjaga dan terawasi sesuai dengan ajaran apabila pengaturan, sikap, dan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan kehidupan bersama masyarakat dan negara, diselenggarakan secara terbuka; apabila persamaan tegak; apabila tanggungjawab dan gugatan bisa dilakukan. Dengan demikian pula rakyat dapat mengukur apakah sikap, perbuatan, dan pelaksanaan dalam pengaturan masyarakat dan negara memang sesuai dengan tuntutan nilai-nilai tersebut, ataupun sesuai dengan aspirasi rakyat banyak.

Dengan kedatangan Islam di Indonesia lingkungan tempat tumbuhnya Islam itu pun turut mempengaruhi sehingga dijumpailah pengaruh baik dan pengaruh tidak baik di tengah masyarakat sebagai warisan dan paham budaya lama, sebagaimana juga dijumpai pengaruh baik dan pengaruh tidak baik di tengah masyarakat sebagai warisan dan paham budaya lama, sebagaimana juga dijumpai pengaruh baik dan tidak baik bila kedatangan pengaruh asing. Perlu juga diperhatikan bahwa kehidupan sekular ada yang bisa diterima dalam Islam, terutama bila segi teknis yang diperhatikan. Transparansi dalam negeri demokrasi modern Barat merupakan syarat bagi tegaknya demokrasi, demikian juga trias politika.[15]

[15]Abdurrahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di* Indonesia, …, hal. 113.

Politik Islam menuntut penganutnya untuk mengikut sertakan akhlak, etika, dan moral dalam sikap dan tindakannya. Jika tidak maka yang lebih menonjol dalam sikap dan tindakan itu adalah sikap keparaktisan atau kepragmatisan belaka. Yang mudah untuk diperhatikan adalah segi akhlak (moral, etik) yang dituntut oleh Islam dan yang harus ditegakkan oleh para penganutnya. Akhlak ini tentunya berhubungan dengan diri pribadi (niat, sikap, perbuatan, pikiran, perasaan), tetapi ia juga harus tegak di tengah-tengah masyarakat dan negara.

Perlu diperhatikan bahwa di antara ajaran Islam itu ada yang bisa dipraktikkan oleh masyarakat yang tidak menyadari ajaran Islam, ataupun yang tidak Islami sama sekali. Umpamanya, tentang pekerjaan "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (UUD 1945 pasal 27 ayat 2). Persamaan kesempatan dalam Islam merupakan cermin dari keadilan, dan seseorang dalam Islam wajib membela para *mustadh'afin* (kaum yang lemah). Hal-hal seperti ini bersangkut dengan ideologi, akan tetapi ideologi seperti yang dikemukakan liberalisme-kapitalisme telah banyak mengalami perubahan. Negara-negara saat ini mengejar apa yang disebut *walfare state* (negara kesejahteraan). Oleh sebab itu, dalam hal-hal tertentu perjuangan partai di negeri-negeri Barat itu, di samping memperhatikan cara untuk memenangkan pemilihan umum (bagaimana mendapatkan pengikut), yang lebih memperlihatkan kesamaan arah diantara berbagai partai. Malah kesamaan arah tadi memungkinkan partai di Barat lebih memperhatikan cara memperoleh kemenangan.

Dalam rangka ini, perlu imbauan kalangan Islam dalam konstituante tahun 1959. Kalangan Islam mengemukakan keinginannya agar bagi mereka yang muslim diberlakukan hukum Islam, agar mereka yang bukan muslim memberlakukan hukumnya pula (khatolik bagi yang khatolik, protestan bagi yang protestan, dan sebagainya), serta supaya negara membenarkan dan memperlakukan seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW hal demikian juga pernah dilaksanakan. Dalam rangka apa yang disebut dengan konstitusi madinah, seorang Muslim yang melanggar ketentuan tersebut mendapat hukuman dari Nabi. Dalam menghadapi masyarakat Nabi berbekal shalat lima waktu yang khusus dijemputnya dalam Isra dan Mikraj langsung dari Allah SWT. Disinilah ia membina masyarakat.[16]

Dapatlah dipahami mengapa ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa:

ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ ٤٥

45.bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-'Ankabut (29): 45) [17]

[16]Abdurrahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia,…,* hal. 115.

[17]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal. 401.

Bahwa shalat bagaikan tindak mencegah hal-hal ini di negeri kita yang penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, tentulah merupakan hal yang lain pula.[18]

Deliar Noer berpendapat bahwa dalam Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik). Akan tetapi dalam mengartikulasikan kedua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Berarti *Al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara). Disini tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara, karena Islam meliputi kedua aspek tersebut. Wilayah agama meliputi politik dan negara, karena memang kedaulatan itu sendiri berasal dari tuhan. Islam merupakan sebuah syariat yang punya hukum dan aturan Kaffah kamilah bagi tatanan masyarakat dan politiknya. Jadi yang bertanggung jawab jalannya syariat dalam masyarakat adalah negara. Dengan demikian segala aturan negara harus berasaskan dan sejalan dengan hukum-hukum agama Islam. [19]

Keruwetan, kemajemukan, dan keragaman hidup masa kini, hendaknya dapat kita lihat dengan jernih. Namun, prinsip haruslah tegak, termasuk oleh partai yang menginginkan kemenangan dengan persaingan antar partai. Islam menyuruh umatnya untuk menegakkan prinsip ini bagi diri, masyarakat, dan kehidupan negara. Oleh sebab itu, dalam rangka berpartai, disamping ia harus menegakkan dan memperlihatkan antara lain akhlak, tetapi juga ajaran-ajaran prinsip tadi. Ia juga tidak memaksa orang lain menerimanya. Dalam penegakan

[18]Abdurrahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*,… hal. 114

[19]https://www.academia.edu/38381942/pemikiran_politik_deliar_noer_tentang_agama_negara_Islam Diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 20.14 WIB

syariat Islam menurutnya syariat Islam perlu ditegakkan di Indonesia secara resmi melalui peraturan perundang-undangan. Penegakan syariat Islam tersebut tidak bisa mengabaikan simbolisme, substansinya penting, namun simbol juga perlu, simbol dianggap menggembirakan dan memudahkan pemahaman masyarakat awam. Deliar mengatakan bahwa partai Islam lebih banyak menjaga kepentingan negara daripada kepentingan kelompok. Dalam rangka keagamaan, tentulah persamaan ditegakkan pula. Kalau tidak Islam hanya tinggal nama tanpa isi. Tentu hal ini tidak kita inginkan terutama kalau diingat bahwa Islam hendaknya menjadi "rahmat bagi sekalian alam". [20]

Tentang negara Islam Deliar Noer menolak kalau Islam dikatakan tidak punya konsep kenegaraan ia berpendapat bahwa negara Islam sebagai konsep itu ada negara Islam sebagai konsep bisa ditelusuri dari pangkal ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun parameter negara Islam sebagai konsep menurut Deliar Noer yaitu (1) Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan pegangan dan rujukan dalam hidup bernegara, bukan berarti kembali ke masa nabi dan sahabat. Tetapi diberlakukannya prinsip-prinsip pokok secara langgeng, lepas dari soal waktu dan tempat, hingga senantiasa bisa dijadikan pedoman; (2) hukum dijalankan dalam pengertian berlakunya syariat yang dapat menyatukan ummat; (3) berlakunya prinsip syura sebagaimana yang dijalankan Nabi Muhammad SAW.

C. Kontribusi Pemikiran Politik Islam Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia

Bersama-sama dengan Prof. Miriam Budiardjo, Deliar Noer termasuk orang pertama yang meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu politik di

[20]Abdurrahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*,…, hal. 116.

Indonesia. Dalam ilmu politik di Indonesia Deliar Noer bisa disejajarkan dengan Sartono Kartodirdjo dan untuk antropologi dengan Koentjaraningrat. Namun berbeda dengan yang lain yang terus berkesempatan bergaul di dunia universitas dan mendidik para mahasiswa, Deliar Noer diasingkan sebagai akibat dari kritisme dan konsistensi politiknya. Ketika kesempatan mengajarnya terbatasi Deliar Noer tetap meneruskan pengajaran dengan memaksimalkan perannya melalui publikasi karya tulisnya. Keseriusan meneliti dan menulis serta konsistensi dan independensi sikap-sikap politik Deliar Noer membuatnya menjadi ilmuwan politiuk langka. [21]

Mengenai hubungan Pancasila dengan Islam Deliar Noer berpendapat bahwa Pancasila memang tidak bertentangan dengan Islam, tetapi hal ini sangat bergantung pada tafsiran yang diberikan. Banyak ajaran Islam yang tidak tercangkup dalam Pancasila atau dimasa bodohkan. Kalangan Islam memang menerima Pancasila, karena mereka menafsirkan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, oleh sebab itu Deliar Noer menentang keras tentang pemberlakuan azas tunggal Pancasila, sebagai satu-satunya azas bagi partai politik. Pemberlakuan ini berarti menafsirkan kebhinekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing, keyakinan itu bisa bersumber dari agama atau pemahaman lain.

Kondisi politik Indonesia yang menjadikan simbol Islam sebagai senjata ampuh dalam upaya mendapatkan dukungan, nilai-nilai ke Islaman juga harus menjadi patokan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam memimpin suatu

[21]https://ajidedim.wordpress.com/2008/06/18/bapak-politik-indonesia-deliar-noer berpulang. Di akses pada tanggal 18 september 2019.

bangsa dan negara. Dikaitkan dengan fenomena politik Indonesia yang menjadikan basis Islam sebagai basis suara utama untuk memenangkan kontestasi tersebut maka nama besar umat Islam itu seyogyanya ditularkan pada gaya kepemimpinan para calon. Selain itu, nilai-nilai moral Islam yang dimaksudkan oleh Deliar Noer haruslah juga menjadi dasar pemikiran dalam praktik kampanye maupun sosialisasi serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil artinya nilai-nilai Islam harus diterapkan pada semua aspek politik di Indonesia. Dengan demikian hukum-hukum Islam akan sendirinya berjalan tanpa menentang sistem ketatanegaraan yang berlaku termasuk demokrasi dan pancasila. Hal ini sesuai dengan pemikiran politik Deliar Noer yang memandang agama Islam sangat universal.

Besarnya pengaruh umat Islam dalam perpolitikan Indonesia saat ini menjadi suatu jaminan ideologi akan bangkitnya kembali kesadaran berislam dalam bernegara pada kalangan Islam. Ia menyarankan agar partai-partai Islam bekerjasama untuk menegakkan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama. Idealnya, negara akan berjalan pada rel Islam meskipun negara dalam bentuk republik serta berjalan pada sistem demokrasi. Ideologi pancasila yang dijiwai oleh ideologi Islam akan memberikan dampak perubahan moral baik pada pemimpin negara maupun pada mayarakat. Jika meminjam istilah "revolusi mental" Presiden Jokowi, maka dengan pemikiran Deliar Noer program pemerintah tersebut akan tercapai setidaknya pada kalangan Islam itu sendiri.

D. Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Politik Islam Deliar Noer di Indonesia

Menurut hemat penulis dari pandangan dan nilai-nilai politik yang dikemukakan oleh Deliar Noer ia termasuk kepada aliran pemikiran politik yang bagian ketiga, yaitu aliran yang menolak Islam sebagai agama dalam pengertian Barat, dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran yang berpendirian bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat sistem politik, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu sistem politik. Aliran ini berusaha untuk merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman, Islam memberikan seperangkat nilai-nilai yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi ummatnya.

Deliar Noer melihat Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat serta negara. Deliar Noer menganjurkan tegaknya cara-cara terntentu, termasuk sistem secara umum dengan mencontoh kepada hal-hal yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Akan tetapi bentuk negara dan sitem pemerintahan menurut Deliar Noer bisa mengacu kepada suatu sistem tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam menurut Deliar Noer setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik). Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Berarti *al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara). Disini tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara, karena Islam meliputi kedua aspek tersebut. Wilayah

agama meliputi politik dan negara, karena memang kedaulatan itu sendiri berasal dari Tuhan. Islam merupakan sebuah syariat yang punya hukum dan aturan bagi tatanan masyarakat dan politiknya. Jadi, negara itu berfungsi menjalankan syariat Islam terhadap masyarakat yang bertanggung jawab jalannya syariat dalam masyarakat adalah negara. Dengan demikian segala aturan negara harus berasaskan dan sejalan dengan hukum-hukum agama Islam.

Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat serta negara. Deliar Noer menganjurkan tegaknya cara-cara terntentu, termasuk sistem secara umum dengan mencontoh kepada hal-hal yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Akan tetapi bentuk negara dan sitem pemerintahan menurut Deliar Noer bukan merupakan lembaga yang bersifat langgeng dipandang dari sudut waktu dan tempat. Maka konsep negara Islam bisa mengacu kepada suatu sistem tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga relevan dengan kondisi dan situasi suatu negara.

Deliar Noer menginginkan umat Islam agar menjadikan Islam sebagai agama yang mencakup semua termasuk negara dan politik adalah keniscayaan Islam menurut pandangannya. Namun, tidak sedikit kalangan yang masih tidak menjadikan Islam sebagai panduan universal sehingga menjadi sebuah permasalahan karena negara Indonesia berpenduduk mayoritas Islam. Pemahaman akan Islam harus benar-benar terbuka sehingga negara yang dicita-citakan berjalan sesuai dengan jalan demokrasi yang Islami meskipun tidak berbentuk

negara Islam. Politik Islam menurut pandangannya Islam menuntut penganutnya untuk mengikut sertakan akhlak, etika, dan moral dalam sikap dan tindakan. Apabila hal ini tidak dijalankan maka yang lebih menonjol dalam sikap dan tindakan adalah segi kepragmatisan belaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Pemikiran Politik Deliar Noer dalam Konteks Politik Islam di Indonesia, maka penulis berkesimpulan:

1. Kiprah Deliar Noer dalam konteks politik Islam Indonesia adalah pada tahun 1968 Deliar Noer bersama Muhammad Hatta mempersiapkan kelahiran PDII (partai Demokrasi Islam Indonesia), yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Islam yang belum mempunyai wadah partai untuk menyatukan keinginan politiknya, di era reformasi, Deliar Noer membentuk partai yaitu Partai Umat Islam Indonesia (PUI). Kiprah Deliar Noer di dunia politik Indonesia tidak sebaik nama besarnya di dunia Ilmu pengetahuan.
2. Pemikiran politik Deliar Noer dalam politik Islam, Deliar Noer sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang tidak memisahkan kehidupan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tegaknya nilai-nilai kehidupan dalam diri pribadi dan masyarakat serta negara. Deliar Noer menganjurkan tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem secara umum dengan mencontoh kepada hal-hal yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Konsep negara Islam bisa mengacu kepada suatu sistem tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga relevan dengan kondisi dan situasi suatu negara.

3. Pengaruh pemikiran politik Deliar Noer dalam politik Islam Indonesia. Deliar Noer menyarankan agar partai-partai Islam bekerjasama untuk menegakkan keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama. Idealnya, negara akan berjalan pada rel Islam meskipun negara dalam bentuk republik serta berjalan pada sistem demokrasi. Ideologi pancasila yang dijiwai oleh ideologi Islam akan memberikan dampak perubahan moral baik pada pemimpin negara maupun pada mayarakat.

B. Saran

1. Kepada umat Islam agar selalu memperkuat aqidahnya, semakin kritis terhadap pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar Islam. Sehingga tidak mudah goyah ditengah-tengah banyaknya paham yang berkembang yang dapat merusak keyakinan. Umat Islam harus dewasa dan terbuka dalam menyikapi berbagai pemikiran, sehingga tidak menimbulkan konflik diantara umat Islam itu sendiri.
2. Sebagai penguasa atau pemimpin hendaklah mempunyai moral dan etika dalam melakukan tindakan dan perbuatan karena pemimpin merupakan panutan bagi masyarakat banyak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tentunya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini baik dalam penulisan maupun isinya. Akhirnya kepada Allah SWT. Kita berserah diri dari segala kekhilafan kita dan dosa serta ampunan-Nya. Wassalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung, Pustaka Setia: 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia. 2011.

Efrinaldi. *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Granada Press, 2007.

Harjono, Anwar. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam.* Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Kencana, Inu. *Pengantar Ilmu Politik: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu politik dalam megubah politik biadab menjadi politik beradab*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2009.

Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Amin *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1999.

Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1983.

Muhammad, Herry. dkk. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20.* Jakarta: Gema Insani Press. 2006. cet.1.

Noer, Deliar. *80 Tahun Deliar Noer.* Jakarta Selatan: Hilal Publishing House. Cet. I. 2007.

_____, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar* Noer. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI. 1996.

_____, *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa.* Bandung, Mizan Anggota IKAPI. 2001.

_____, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1965.* Jakarta: Grafiti Pers. 1987.

_____, *Pengantar Ke Pemikiran Politik.* Jakarta: C.V. Rajawali. (Edisi Baru) 1982.

Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1982.

Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku bangsa: risalah Cendekiawan Muslim.* Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1996.

Rasidi, Ajip. *Mengenang Hidup Orang Lain: Sejumlah Obituari*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2010.

Saydam, Gouzali. *55 Tokoh Asal Minang Kabau di Pentas Nasional.* Bandung: Alfabeta. 2009.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Boedi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*. Bandung: Mizan Pustaka. 2017.

_____, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia.* Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1994.

Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Wahid, Abdurrahman. dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di* Indonesia. Bandung: Pustakan Hidayah. 1999.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004. Cet. Ke-1.

Ismanizar: *Jurnal Kepemimpinan negara menurut pandangan Deliar Noer*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), *Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 226-244*

Ahmad, Jumal.*"Biografi Prof. Dr. Deliar Noer",* dalam http:/www.biografi-deliar-noer.htm (24 November 2010)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sjafruddin_Prawiranegara, Diakses pada 30 29 Oktober 2019 pukul 10.15 WIB

https://ahmadbinhanbal.wordpress.com diakses 30 Oktober 2019 pukul 08.20 WIB

https://ajidedim.wordpress.com/2008/06/18/bapak-politik-indonesia-deliar-noer berpulang. Di akses pada tanggal 18 september 2019.

https://alif.id/read/aguk-irawan-mn/sejarah-singkat-kh-m-hasyim-asyari-b2190666p/ 30 Oktober 2019m pukul 20.25 WIB

https://ejornal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/93/pdf.Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 19.35.

Ejournal.politik.lipi.go.id>jppPDF hasil web Pemikiran politik Islam dalam persfektif…-jurnal penelitian politik. Di akses pada 28 Oktober 2019 Pukul 16.25 WIB.

https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/read/2018/02/135204/belajar-darideliar noer . html Diakses pada 30 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deliar_Noer Diakses 30 Oktober 2109 pukul 08.15 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Asy%27ariDiakses pada 30 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_natsir Diakses pada 28 Oktober pukul 21.53 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/14043340/deliar.noer.meninggal.dunia.Diakses 30 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB

https://radarsukabumi.com/2019/05/13/politik-islam-pasca-pemilu/Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 16.45 WIB.

https://www.academia.edu/38381942/pemikiran_politik_deliar_noer_tentang_agama_negara_Islam Diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 20.14 WIB.

https://www.researchgate.net/publication/313653384_Ideologi_Gerakan_Politik_lam_di_Indonesia, Diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 21.15 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Ira Rahmadani
Tempat, tanggal lahir	: Sei. Pimping, 24 Maret 1997
Nim	: 1315.035
Program studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Nomor Handphone	: 085264372644
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Sahut Simarmata
Ibu	: Asro Siregar
Alamat	: Sei. Pimping Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 17 Makmur (2003- 2009)
2. SMP Negeri 2 Padang Gelugur (2009- 2012)
3. SMK Negeri 1 Ampek Angkek (2012- 2015)
4. IAIN Bukittinggi (2015- 2019)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Bidang Sosial dan Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah-Siyasah (HMJ-JS) periode 2016-2017 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tatanegara (Siyasah) periode 2017-2018 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Anggota kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi.